



Laporan Kinerja *Tahunan*

2023



**KEJAKSAAN TINGGI
JAWA TIMUR**



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| DAFTAR ISI | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| BAB I | 1 |
| A. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| B. STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR..... | 2 |
| BAB II | 5 |
| A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2020-2024..... | 5 |
| B. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR 2023..... | 9 |
| BAB III | 13 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... | 13 |
| B. REALISASI ANGGARAN..... | 61 |
| BAB IV | 64 |

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sistematis dan tata cara penyusunannya diatur lebih komprehensif dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023 merupakan bagian dari pertanggungjawaban pimpinan unit pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran-sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia Indonesia. Laporan Kinerja ini juga merupakan bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean governance) yang merupakan bagian dari asas-asas umum dari pemerintahan yang baik (AAUPB) yang diakui secara global.

Kami menyadari bahwa baik dalam pelaksanaan kinerja maupun penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023 ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, namun kami terus bersemangat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan substantif dalam pencapaian kinerja dan pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur agar menjadi optimal.

Semoga penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023 ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan tambahan dalam manajemen kinerja Kejaksaan Republik Indonesia pada khususnya dan Pemerintah pada umumnya guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur



MIA AMIATI

Jaksa Utama Madya





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54-56, Kota Surabaya, Jawa Timur 60235
Telp. (031) 8290577 fax. (031) 8293826, <http://kejati-jatim.go.id>
Email : pengawasankejatijatim@gmail.com

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Surabaya, 28 Februari 2024
Asisten Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur



Dr. Diah Yulastuti, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19700731 199503 2 002





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54-56, Kota Surabaya, Jawa Timur 60235
Telp. (031) 8290577 fax. (031) 8293826, <http://kejati-jatim.go.id>
Email : pengawasankejatijatim@gmail.com

Laporan Hasil Reviu
Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2023

I. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

II. Dasar reviu

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Pedoman Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor : 3 Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Pengawasan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : PRIN – 280B/M.5/H.VI.2/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 dalam rangka melaksanakan Reviu atas Laporan Kinerja Tahunan 2023 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

III. Waktu dan Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan dari tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024. Reviu atas Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 setelah dilaksanakan setelah pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.



IV. Tujuan dan Sasaran Reviu

1. Tujuan Reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data / informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023
2. Sasaran reviu meningkatnya kualitas Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 yang disusun oleh Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

V. Ruang Lingkup Reviu

Ruang Lingkup Reviu atas Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Metode pengumpulan data / informasi.
2. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas.
3. Penyusunan Kertas Kerja Reviu.

Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Reviu adalah berdasarkan data kinerja manajemen

VI. Simpulan

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Memperhatikan ketentuan diatas Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah melaksanakan Reviu terhadap Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :



1. Penyajian Laporan Kinerja (LKj)

Penyajian Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 telah menggunakan format Laporan Kinerja sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Mekanisme Penyusunan

- a. Laporan Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 disusun oleh Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
- b. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah cukup, didukung dengan data yang memadai.
- c. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari seluruh bidang di satuan kerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ke Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
- d. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah cukup dilakukan verifikasi dan validasi secara berjenjang.

3. Substansi

- a. Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam dokumen perjanjian kinerja;
- b. Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan RPJMN;
- c. Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- d. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja dalam RPJMN merupakan target indikator Kinerja Tujuan/Sasaran dalam perjanjian Kinerja.
- e. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada laporan Kinerja telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.
- f. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja telah cukup menyatakan tujuan/sasaran.
- g. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) telah cukup SMART.

4. Penyampaian Laporan Kinerja

Penyampaian Laporan Kinerja sudah tepat waktu, yaitu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau 28 Februari tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Demikian Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Februari 2024
Asisten Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur



Dr. Diah Yulastuti, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19700731 199503 2 002



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap tingkatan organisasi yang membuat Perjanjian Kinerja diwajibkan membuat Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki posisi Strategis dalam penegakan hukum, dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan Hak Asasi Manusia, serta Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya penegakkan hukum yang optimal, nyata dan terpercaya, dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyusun Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2023 sebagai perwujudan capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam satu Tahun anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja, karena dalam laporan tersebut akan menjelaskan keberhasilan yang sudah dicapai dan yang kinerjanya belum tercapai.

B. STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Kewenangannya, didalam Pasal 1 (1), Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dibantu oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan para Asisten, yaitu Asisten Pembinaan, Asisten Intelijen, Asisten Tindak Pidana Umum, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Tindak Pidana Militer, Asisten Pengawasan dan Kepala Bagian Tata Usaha. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya para Asisten menyelenggarakan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam tata kerjanya melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan, semua unsur di lingkungan Kejaksaan berpedoman kepada asas Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan dan fungsinya di bidang penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki, yang pelaksanaannya dilakukan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan yang melaksanakan fungsi, tugas, wewenangnya secara Merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai 3 (tiga) tugas utama, wewenang yang dimiliki Kejaksaan antara lain:

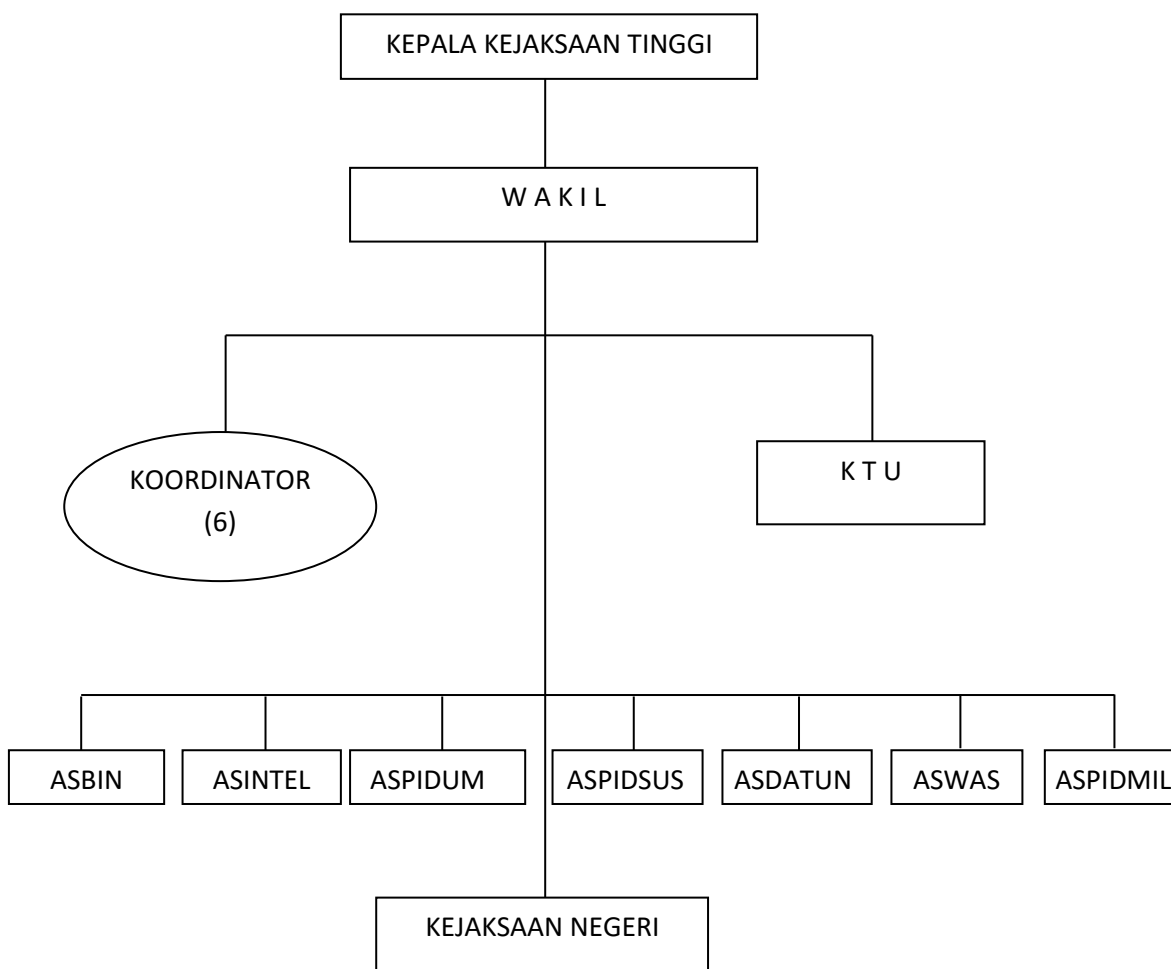
1. Di Bidang Pidana:
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat,

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.
2. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan Surat Kuasa Khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan pagedaran barang cetakan ;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama ;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Dengan telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kejaksaan sendiri maupun dalam hubungan antar Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga Negara, Instansi-instansi lain, untuk kesatuan gerak yang sesuai dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsinya, aparat Kejaksaan bertanggung jawab secara hierarki kepada Pimpinan

Satuan Organisasi masing-masing, serta berpedoman kepada asas satu kesatuan dan tidak terpisah-pisahkan (*een en ondeelbaar*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004. Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017, Skema Struktur Organisasi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR



BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2020 - 2024

Rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode lima tahun yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Startegis yang diambil oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Visi dan Misi merupakan panduan dalam memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh Kejaksaan. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan arah kebijakan dan pelaksanaan supermasi hukum sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum yang fungsi penuntutan serta sejalan dengan arah dan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I. ke depan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahap II Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden R.I. Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 yang memuat Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.

Visi dan Misi Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan R.I. Tahun 2020 – 2024.

- **VISI:**

Visi Kejaksaan Tahun 2020 – 2024 adalah ***Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”***.

- **MISI:**

Misi Kejaksaan Tahun 2020– 2024 adalah:

- 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan R.I. ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1)***;
- 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan R.I. dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8)***;
- 3. Meningkatkan Peran Kejaksaan R.I. dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6)***;
- 4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan R.I. dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7)***;

5. **Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8);**
6. **Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan R.I. Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8);**

- **TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana Sasaran Nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai Sasaran Program Prioritas Presiden. Visi Kejaksaan RI yang dijabarkan dalam tujuan yang hendak dicapai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI (Diukur dengan: Jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi atau dan keahlian);
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (diukur dengan meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (Diukur dengan: Jumlah Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi setiap tahunnya);
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan Perkara Tindak Pidana. (Diukur dengan: Persentas Penyelesaian perkara pidana dengan prinsip restorative justice, jumlah Perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara (Diukur dengan: Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan Perdata);
6. Meningkatnya kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Diukur dengan: Jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024).

- **SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis, Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang dalam penyusunan strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2020-2024 Kejaksaan RI. Menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI; dengan Indikator : Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi dan atau keahlian);
2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas; (Dengan Indikator : Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI,

- Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI , serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhkan hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Dengan Indikator : Persentase Kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Dengan Indikator: Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
 5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (dengan Indikator Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan Perdata;
 6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai (IT) Master Plan Kejaksaan RI menetapkan sasaran strtegis dengan Indikator : Persentse kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan (IT) Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024.

Untuk Mewujudkan visi dan misinya, Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja, Kinerja sasaran (IKS) sebagai berikut :

Tabel 1
Rencana Strategi Kejaksaan RI Tahun 2020-2024

| NO. | SASASARAN STRATEGIS | | 2020 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 |
|-----|--|---|------|------|------|------|------|
| 1. | Meningkatnya Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI | | | | | | |
| | IK.1 | Persentase Aparata Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan /atau keahlian. | 25 | 35 | 50 | 75 | 85 |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI | | | | | | |
| | IK.2.1 | Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| | IK.2.2 | Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI | 80 | 85 | 87 | 90 | 95 |
| | IK.2.3 | Persentase berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur | 40 | 55 | 75 | 85 | 90 |

| | | Kejaksaan RI | | | | | |
|-----------|--|--|----|----|----|----|----|
| 3. | Terwujudnya Pencegahan Pidana Korupsi. | Upaya Tindak | | | | | |
| | IK.3 | Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 4. | Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Pidana | Tindak | | | | | |
| | IK.4.1 | Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi. | 90 | 92 | 95 | 97 | 99 |
| | IK.4.2 | Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 5. | Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara. | | | | | | |
| | IK.5.1 | Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 |
| | IK.5.2 | Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 |

B. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR TAHUN 2023

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa salah satu tahapan yang harus dilaksanakan adalah melaksanakan Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja agar terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja harus disusun setelah Instansi Pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan, serta menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan sesuai format Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh KEMENPAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itulah Perjanjian Kinerja ini disusun agar dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk peningkatan kerja dan penguatan akuntabilitas pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja (**outcome**) yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup **outcome** yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Pimpinan dan Pimpinan Struktural dibawahnya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur ;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (bila diperlukan) ;

4. Sebagai dasar bagi Pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja Pimpinan Struktur di bawahnya ;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Adapun Perencanaan Kerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur termuat dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2
Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) |
|-----|---|--|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi | Prosentase Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian | 75 |
| 2. | Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi | Prosentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi | 85 |
| 3. | Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi | Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi | 85 |
| 4. | Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi | Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi | 97 |
| | | Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum | 85 |

| | | Kejaksaan Tinggi | |
|----|--|--|----|
| 5. | Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi | Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi | 82 |
| | | Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi | 82 |

Untuk melaksanakan target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tersebut terangkum dalam 2 (dua) Program dan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Bidang pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan alokasi anggaran per Program Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut :

Tabel 3

Dukungan Anggaran di Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023

| NO | KODE PROGRAM/KEGIATAN | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) |
|----|-----------------------|--|-------------------------|
| 1. | 00601BF | Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum | 48.179.734.000,- |
| | 1102 | Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari, dan Cabjari | 1.206.076.000,- |
| | 1103 | Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah | 1.709.060.000,- |
| | 6582 | Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri | 45.264.598.000,- |

| | | | |
|-------------------------|----------------|---|--------------------------|
| 2. | 00601WA | Program Dukungan Manajemen | 463.976.308.000,- |
| | 1090 | Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejati, Kejari, Cabjari | 458.496.508.000,- |
| | 1091 | Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI | 5.008.800.000,- |
| | 1097 | Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan Kejari yang terdapat Cabjari | 471.000.000,- |
| PAGU KESELURUHAN | | | 512.156.042.000,- |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (**result oriented**). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (**output and outcome**) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya. **Output** merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan **outcome** adalah manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tahun anggaran 2023 yang memiliki 5 (lima) sasaran strategis yang diukur menggunakan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS |
|----|---|--|
| 1. | Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi | Prosentase Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian |
| 2. | Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi | Prosentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi |
| 3. | Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi | Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi |
| 4. | Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi | Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi |
| | | Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi |
| 5. | Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi | Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi |
| | | Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi |

Berdasarkan Pedoman Nomor 15 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 pada lampiran IX Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 Kejaksaan Tinggi terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang ingin dicapai. Adapun uraian pencapaian 5 (lima) Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1:

Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan Republik Indonesia

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator kinerja berupa :

Tabel 5

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis I

| INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|--------|
| Prosentase Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian. | 75% |

Capaian indikator kinerja tersebut diukur dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang telah memperoleh sertifikat kompetensi dan atau keahlian}}{\text{Jumlah Pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur}} \times 100$$

Secara garis besar, Pegawai Kejaksaan dapat dibedakan antara Fungsional Jaksa dan Tata Usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mensyaratkan harus lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.

Disamping itu jabatan fungsional tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, antara lain fungsional Peneliti, Fungsional Pustakawan, Fungsional Perencana, Fungsional Sandiman, Fungsional Pranata Komputer, Fungsional Pranata Humas, dan Fungsional Widyaiswara, serta jabatan Fungsional Umum.

Jumlah Pegawai pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 sebanyak 2.165 orang, terdiri dari tenaga Jaksa 957 orang dan pegawai Tata Usaha sebanyak 1.208 orang.

Diagram 1



Tabel 6
Jumlah Jaksa dan Tata Usaha

| NO. | SATUAN KERJA | Jaksa | Tata Usaha | Jumlah |
|-----|---------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 1 | Kejaksaan Tinggi Jawa Timur | 266 Orang | 140 Orang | 406 Orang |
| 2 | Kejaksaan Negeri Surabaya | 49 Orang | 42 Orang | 91 Orang |
| 3 | Kejaksaan Negeri Bojonegoro | 23 Orang | 40 Orang | 63 Orang |
| 4 | Kejaksaan Negeri Gresik | 20 Orang | 31 Orang | 51 Orang |
| 5 | Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto | 14 Orang | 25 Orang | 39 Orang |
| 6 | Kejaksaan Negeri Lamongan | 15 Orang | 32 Orang | 47 Orang |
| 7 | Kejaksaan Negeri Tuban | 12 Orang | 26 Orang | 38 Orang |
| 8 | Kejaksaan Negeri Jombang | 15 Orang | 26 Orang | 41 Orang |
| 9 | Kejaksaan Negeri Sidoarjo | 37 Orang | 43 Orang | 80 Orang |
| 10 | Kejaksaan Negeri Tanjung Perak | 20 Orang | 32 Orang | 52 Orang |
| 11 | Kejaksaan Negeri Jember | 24 Orang | 31 Orang | 54 Orang |
| 12 | Kejaksaan Negeri Bondowoso | 12 Orang | 24 Orang | 36 Orang |
| 13 | Kejaksaan Negeri Situbondo | 13 Orang | 23 Orang | 36 Orang |
| 14 | Kejaksaan Negeri Banyuwangi | 24 Orang | 22 Orang | 46 Orang |
| 15 | Kejaksaan Negeri Kota Kediri | 29 Orang | 31 Orang | 60 Orang |
| 16 | Kejaksaan Negeri Nganjuk | 10 Orang | 20 Orang | 30 Orang |
| 17 | Kejaksaan Negeri Blitar | 18 Orang | 25 Orang | 43 Orang |
| 18 | Kejaksaan Negeri Tulungagung | 13 Orang | 27 Orang | 40 Orang |
| 19 | Kejaksaan Negeri Trenggalek | 11 Orang | 24 Orang | 35 Orang |
| 20 | Kejaksaan Negeri Pamekasan | 17 Orang | 39 Orang | 56 Orang |
| 21 | Kejaksaan Negeri Bangkalan | 14 Orang | 30 Orang | 44 Orang |
| 22 | Kejaksaan Negeri Sumenep | 12 Orang | 31 Orang | 33 Orang |
| 23 | Kejaksaan Negeri Sampang | 11 Orang | 25 Orang | 36 Orang |
| 24 | Kejaksaan Negeri Kota Madiun | 23 Orang | 38 Orang | 61 Orang |
| 25 | Kejaksaan Negeri Ponorogo | 10 Orang | 23 Orang | 33 Orang |

| | | | | |
|---------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 26 | Kejaksaan Negeri Ngawi | 12 Orang | 32 Orang | 44 Orang |
| 27 | Kejaksaan Negeri Magetan | 12 Orang | 28 Orang | 40 Orang |
| 28 | Kejaksaan Negeri Pacitan | 11 Orang | 24 Orang | 35 Orang |
| 29 | Kejaksaan Negeri Kota Malang | 40 Orang | 45 Orang | 85 Orang |
| 30 | Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan | 17 Orang | 22 Orang | 39 Orang |
| 31 | Kejaksaan Negeri Lumajang | 12 Orang | 20 Orang | 32 Orang |
| 32 | Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo | 12 Orang | 21 Orang | 33 Orang |
| 33 | Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan | 15 Orang | 23 Orang | 38 Orang |
| 34 | Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo | 12 Orang | 19 Orang | 31 Orang |
| 35 | Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto | 13 Orang | 21 Orang | 34 Orang |
| 36 | Kejaksaan Negeri Kab. Malang | 35 Orang | 29 Orang | 64 Orang |
| 37 | Kejaksaan Negeri Batu | 22 Orang | 22 Orang | 44 Orang |
| 38 | Kejaksaan Negeri Kab. Kediri | 17 Orang | 26 Orang | 43 Orang |
| 39 | Kejaksaan Negeri Kab. Madiun | 15 Orang | 27 Orang | 42 Orang |
| JUMLAH | | 957 Orang | 1.208 Orang | 2.165 Orang |

Dari jumlah tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 sebanyak **15** orang telah memiliki sertifikat berupa lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI maupun instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan sertifikat keahlian maupun kecakapan profesi. Bagi fungsional Jaksa, sertifikat tersebut diperoleh atas kecakapan teknis tertentu baik terkait fungsi manajerial maupun terkait dengan penanganan perkara setelah yang bersangkutan menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), sedangkan bagi pegawai Tata Usaha, kriteria sertifikasi diukur dari lulus pelatihan dan pelatihan terkait keahlian fungsional tertentu maupun fungsi keahlian teknis pendukung lainnya setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan Pra Jabatan.

Diagram 2



Tabel 7
Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat

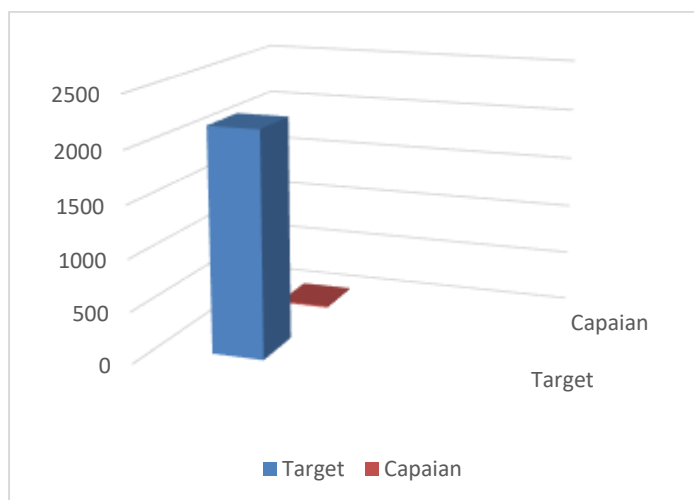
| NO. | SATUAN KERJA | Jumlah Pegawai telah dipanggil DIKLAT | Pegawai yang telah mengikuti DIKLAT | Pegawai yang belum mengikuti DIKLAT |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Kejaksaan Tinggi Jawa Timur | 8 Orang | 8 Orang | 0 Orang |
| 2 | Kejaksaan Negeri Surabaya | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 3 | Kejaksaan Negeri Bojonegoro | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 4 | Kejaksaan Negeri Gresik | 1 Orang | 1 Orang | 1 Orang |
| 5 | Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 6 | Kejaksaan Negeri Lamongan | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 7 | Kejaksaan Negeri Tuban | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 8 | Kejaksaan Negeri Jombang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 9 | Kejaksaan Negeri Sidoarjo | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 10 | Kejaksaan Negeri Tanjung Perak | 1 Orang | 1 Orang | 0 Orang |
| 11 | Kejaksaan Negeri Jember | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 12 | Kejaksaan Negeri Bondowoso | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 13 | Kejaksaan Negeri Situbondo | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 14 | Kejaksaan Negeri Banyuwangi | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 15 | Kejaksaan Negeri Kota Kediri | 1 Orang | 1 Orang | 0 Orang |
| 16 | Kejaksaan Negeri Nganjuk | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 17 | Kejaksaan Negeri Blitar | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 18 | Kejaksaan Negeri Tulungagung | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 19 | Kejaksaan Negeri Trenggalek | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 20 | Kejaksaan Negeri Pamekasan | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 21 | Kejaksaan Negeri Bangkalan | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 22 | Kejaksaan Negeri Sumenep | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 23 | Kejaksaan Negeri Sampang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 24 | Kejaksaan Negeri Kota Madiun | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 25 | Kejaksaan Negeri Ponorogo | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 26 | Kejaksaan Negeri Ngawi | 1 Orang | 1 Orang | 0 Orang |
| 27 | Kejaksaan Negeri Magetan | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 28 | Kejaksaan Negeri Pacitan | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 29 | Kejaksaan Negeri Kota Malang | 1 Orang | 1 Orang | 0 Orang |
| 30 | Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 31 | Kejaksaan Negeri Lumajang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 32 | Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 33 | Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 34 | Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 35 | Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 36 | Kejaksaan Negeri Kab. Malang | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 37 | Kejaksaan Negeri Batu | 2 Orang | 2 Orang | 0 Orang |
| 38 | Kejaksaan Negeri Kab. Kediri | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| 39 | Kejaksaan Negeri Kab. Madiun | 0 Orang | 0 Orang | 0 Orang |
| JUMLAH | | 15 Orang | 15 Orang | 0 Orang |

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian kinerja sasaran strategis I dapat diukur sebagai berikut :

$$\frac{15}{15} \times 100 = 100 \%$$

Dengan demikian capaian tersebut telah melebihi target kinerja yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tahun 2023 yaitu sebesar 75 % dari seluruh Pegawai yang telah dipanggil DIKLAT. Namun jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pegawai yaitu 2.165 orang masih terlalu sedikit pegawai yang telah memperoleh sertifikat DIKLAT, maka diharapkan agar lebih banyak menyelenggarakan lebih banyak kegiatan DIKLAT dikemudian hari yang diutamakan untuk pegawai non Jaksa agar memiliki keahlian khusus.

Diagram 3
Perbandingan Target dengan Capaian
Jumlah Pegawai yang bersertifikasi



SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan Republik Indonesia

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator kinerja berupa :

Tabel 8

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis II

| INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--------|
| Prosentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi. | 85% |

Era keterbukaan informasi dan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bernegara berimplikasi pada semakin tingginya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku personil Kejaksaan RI dalam penerapan kewenangan serta potensi penyimpangan lainnya yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan sebagai aparatur negara dan penegak hukum.

Dengan demikian, jumlah laporan pengaduan masyarakat tidak dapat serta merta diartikan sebagai semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur Kejaksaan, melainkan perlu ditempatkan secara proporsional sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum. Di lain sisi, jumlah laporan pengaduan masyarakat tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan dari jajaran pengawasan internal Kejaksaan dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan pengaduan yang ada sebagai mekanisme kontrol terhadap integritas dan profesionalisme personil Kejaksaan.

Untuk itu, persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

***Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI
di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi
yang berhasil diselesaikan pada tahun berjalan
oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi***

----- x 100

***Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap
Aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi
yang ditangani oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi***

Data Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat oleh Bidang Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

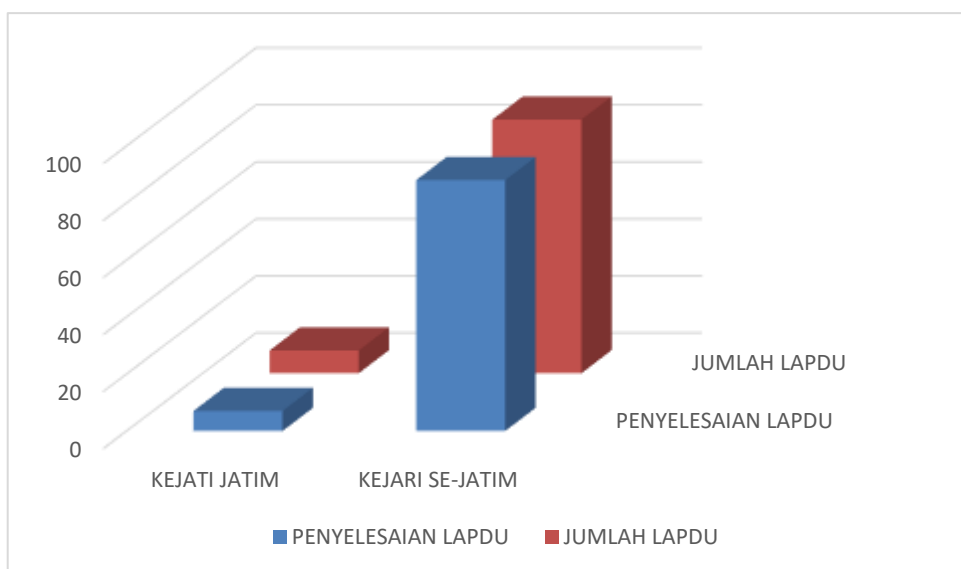
Tabel 9

Data Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat
pada Triwulan III Tahun 2023 dan Triwulan IV Tahun 2023

| NO | SATKER | JUMLAH LAPDU | | JUMLAH PENYELESAIAN LAPDU | |
|---------------|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | | Triwulan III 2023 | Triwulan IV 2023 | Triwulan III 2023 | Triwulan IV 2023 |
| 1. | KT.JAWA TIMUR | 5 | 8 | 5 | 7 |
| 2. | KEJAKSAAN NEGERI SE- JAWA TIMUR | 63 | 89 | 58 | 88 |
| JUMLAH | | 68 Lapdu | 97 Lapdu | 63 Lapdu | 95 Lapdu |

Diagram 4

Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat



Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian keberhasilan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat sampai Triwulan IV Tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{95}{97} \times 100 = 97,93 \%$$

Persentase tersebut **telah** melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu sebesar 85 %. Apabila dibandingkan dengan periode Triwulan III 2023 sebelumnya sebesar 92,65 % penyelesaian Lapdu, maka sampai dengan Triwulan IV 2023 ini kinerja penyelesaian Lapdu pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur lebih tinggi dan melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 97,93 %.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 jumlah Laporan pengaduan yang diterima oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebanyak 97 laporan pengaduan dan yang telah diselesaikan sebanyak 95 laporan pengaduan, sisanya 2 laporan pengaduan masih sementara dalam tahap pemeriksaan saksi dan terlapor.

Dari data tersebut diatas menunjukkan persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat oleh bidang pengawasan sudah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, walaupun persentase penyelesaian laporan pengaduan menurun akan tetapi jumlah penyelesaian laporan pengaduan lebih banyak dari pada Triwulan III dan laporan pengaduan yang tersisa masih dalam proses pemeriksaan.

Tabel 10
Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Golongan
Periode Triwulan III Tahun 2023 dan Triwulan IV Tahun 2023

| NO. | GOLONGAN | Triwulan III Tahun 2023 | | | Triwulan IV Tahun 2023 | | |
|---------------|--------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | TATA USAHA | JAKSA | JUMLAH | TATA USAHA | JAKSA | JUMLAH |
| 1. | Golongan I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Golongan II | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 3. | Golongan III | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 |
| 4. | Golongan IV | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 |
| JUMLAH | | 3 | 11 | 14 | 5 | 16 | 21 |

Tabel 11

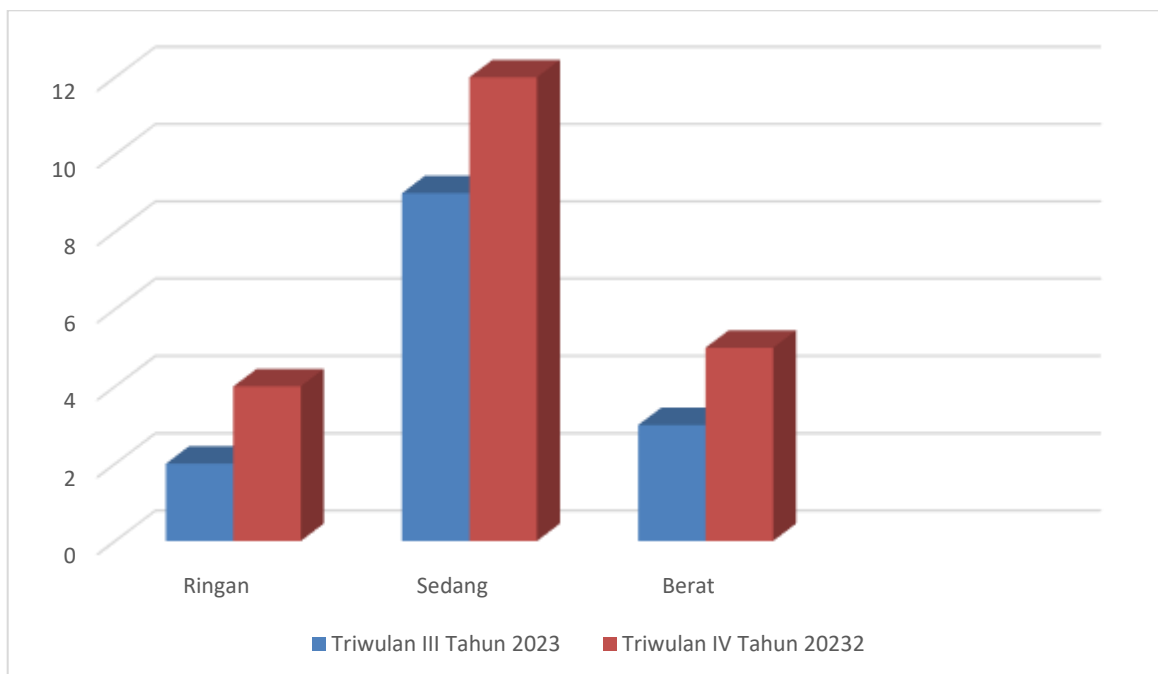
Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman
Periode Triwulan III Tahun 2023 dan Triwulan IV Tahun 2023

| NO. | JENIS HUKUMAN | Triwulan III Tahun 2023 | | | Triwulan IV Tahun 2023 | | |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | TATA USAHA | JAKSA | JUMLAH | TATA USAHA | JAKSA | JUMLAH |
| 1. | Ringan | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Sedang | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 12 |
| 3. | Berat | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| JUMLAH | | 3 | 11 | 14 | 5 | 16 | 21 |

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa pada Triwulan III 2023 dan periode Triwulan IV Tahun 2023 terdapat perubahan secara signifikan terkait jumlah penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yaitu terdiri dari penjatuhan hukuman disiplin ringan sebanyak **4 (empat)** orang, hukuman disiplin sedang sebanyak **12 (dua belas)** orang dan sebanyak **5 (lima)** orang dijatuhkan hukum disiplin berat di periode Triwulan IV 2023.

Diagram 5

Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman



Tabel 12

Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Perbuatan
pada Periode Triwulan III Tahun 2023 dan Triwulan IV Tahun 2023

| NO. | JENIS PERBUATAN | Triwulan III Tahun 2023 | | | Triwulan IV Tahun 2023 | | |
|---------------|----------------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | TATA USAHA | JAKSA | JUMLAH | TATA USAHA | JAKSA | JUMLAH |
| 1. | Indisipliner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Penyalagunaan wewenang | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 3. | Perbuatan tercela lainnya. | 3 | 8 | 11 | 5 | 9 | 14 |
| 4. | Perdata. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 3 | 11 | 14 | 5 | 16 | 21 |

Tabel 13

Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat
Sampai dengan Periode Triwulan III Tahun 2023 dan Triwulan IV Tahun 2023

| NO. | JENIS PERBUATAN | Triwulan III Tahun 2023 | | | Triwulan IV Tahun 2023 | | |
|---------------|---|-------------------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|
| | | TATA USAHA | JAKSA | JUMLAH | TATA USAHA | JAKSA | JUMLAH |
| 1. | Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan. | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2. | Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Pembebasan Dari Jabatan Fungsional Jaksa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pembebasan Dari Jabatan Struktural. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH | | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 |

Keberhasilan dalam pelaksanaan Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat tidak terlepas dari komitmen Pimpinan dan jajaran Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta koordinasi dengan Kejasaan Negeri se Jawa Timur untuk mempercepat pelaksanaan Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat secara tuntas. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, yaitu:

1. Terlapor pindah tugas di Luar Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
2. Identitas Pelapor tidak jelas (anonim);
3. Alamat pelapor tertera dengan jelas dan lengkap tetapi pada waktu dipanggil tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas.

Terkait kendala di atas, Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga telah menyusun saran/strategi optimalisasi capaian kinerja pada triwulan selanjutnya dalam rangka pemenuhan target kinerja, yaitu:

1. Meminta bantuan kepada Kejaksaan Tinggi cq Asisten Pengawasan di luar wilayah hukum Kejati Jatim, untuk melakukan pemeriksaan terhadap terlapor dengan daftar pertanyaan terlampir;
2. Meminta bantuan kepada Kejari di Wilayah hukum Kejati Jatim untuk membantu pemanggilan secara patut kepada pelapor, apabila domisili pelapor masih berada di wilayah kerja Kejari tersebut;
3. Meminta surat keterangan dari pihak yang berwenang setempat RT/RW dan apabila pelapor adalah LSM maka meminta surat keterangan kepada Litbang Limas tentang keberadaan LSM tersebut.

SASARAN STRATEGISI 3 :
Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pencapaian sasaran strategis III diukur dari Indikator Kinerja berupa :

Tabel 14
Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis III

| INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--------|
| Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi. | 85% |

Capaian indikator Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang mendukung upaya Pencegahan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi}}{\text{Jumlah target keseluruhan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.}} \times 100$$

Penegakan Hukum merupakan upaya sadar dan rasional untuk mengendalikan tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat dalam batas-batas toleransi. Sebagai sebuah upaya rasional, maka penegakan hukum mencakup spektrum yang luas dan tidak hanya sebatas menindak para pelaku pelanggaran hukum, melainkan merupakan sebuah sistem pengendalian kejahatan yang mencakup upaya preventif, edukatif dan represif sebagai upaya terakhir (last resort).

Aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara maupun mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat, Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum

masyarakat untuk dapat bersedia menaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Fungsi Kejaksaan terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi antara lain berupa perbaikan sistem pencegahan tindak pidana korupsi dilingkungan internal Kejaksaan melalui Penetapan Satuan Kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Sedangkan secara Eksternal dilakukan antara lain melalui fungsi bidang Intelijen terkait kegiatan pengamanan pembangunan strategis, penyuluhan dan penerangan hukum serta fungsi bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis kepada masyarakat.

3.1. Satuan Kerja yang diusulkan dan memperoleh predikat WBK / WBBM

Pada Tahun 2022 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan surat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Tim Penilai Daerah (TPD) Nomor : B-2709/M.5/Cr/05/2023 tanggal 31 Mei 2022 telah melakukan pengusulan unit kerja layanan berpredikat menuju WBK / WBBM sebanyak 36 Satker/unit kerja dengan rincian 17 WBBM dan 19 WBK.

Tabel 15
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Predikat WBK

| Satuan Kerja yang diusulkan WBK | | | Satuan Kerja yang telah memperoleh WBK | | |
|---------------------------------|------------------|--------|--|------------------|--------|
| Kejaksaan Tinggi | Kejaksaan Negeri | Jumlah | Kejaksaan Tinggi | Kejaksaan Negeri | Jumlah |
| - | 19 | 19 | 1 | 20 | 21 |

Tabel 16
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Predikat WBBM

| Satuan Kerja yang diusulkan WBBM | | | Satuan Kerja yang telah memperoleh WBBM | | |
|----------------------------------|------------------|--------|---|------------------|--------|
| Kejaksaan Tinggi | Kejaksaan Negeri | Jumlah | Kejaksaan Tinggi | Kejaksaan Negeri | Jumlah |
| - | - | - | - | 3 | 3 |

3.2 Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Pasca dicabutnya Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (Tp4) Kejaksaan Republik Indonesia, maka peran Kejaksaan dalam mengamankan berbagai program pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis oleh jajaran Direktorat D pada Jaksa Agung Muda Intelijen yang sebelumnya telah dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Dengan demikian maka upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara dalam kegiatan pembangunan yang sebelumnya dilaksanakan oleh TP4 yang bersifat ad hoc, menjadi terlembaga secara definitif sebagai bagian dari tugas dan fungsi Kejaksaan RI.

Menurut Petunjuk Teknis Nomor : B-484/D/Dpp/03/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis, Pengamanan Pembangunan Strategis adalah bagian dari peran Intelijen penegakan hukum dalam melakukan upaya hukum, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan pelaksanaan pembangunan strategis.

Jumlah kegiatan pengamanan pembangunan strategis yang dilaksanakan oleh jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebanyak 241 (***dua ratus empat puluh satu***) kegiatan dengan jumlah pagu anggaran yang di kawal sebesar **Rp. 3.450.893.110.710** (***tiga triliun empat ratus lima puluh milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta serratus sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah***) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17
Jumlah Kegiatan dan anggaran Pengamanan Pembangunan Strategis
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

| SATUAN KERJA | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| KT.JAWA TIMUR | 110 kegiatan | 2.711.909.829.636 |
| KEJAKSAAN NEGERI SE-JAWA TIMUR | 131 kegiatan | 738.983.281.074 |
| JUMLAH | 241 kegiatan | 3.450.893.110.710 |

Tabel 18
Jumlah Kegiatan Pengaman Pembangunan Strategis
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

| NO. | SATUAN KERJA | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | Kejaksaan Tinggi Jawa Timur | 110 kegiatan | 2.711.909.829.636 |
| 2 | Kejaksaan Negeri Surabaya | 0 kegiatan | 0 |
| 3 | Kejaksaan Negeri Bojonegoro | 0 kegiatan | 0 |
| 4 | Kejaksaan Negeri Gresik | 0 kegiatan | 0 |
| 5 | Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto | 10 kegiatan | 50.634.433.504 |
| 6 | Kejaksaan Negeri Lamongan | 30 kegiatan | 61.329.725.250 |
| 7 | Kejaksaan Negeri Tuban | 0 kegiatan | 0 |
| 8 | Kejaksaan Negeri Jombang | 0 kegiatan | 0 |
| 9 | Kejaksaan Negeri Sidoarjo | 19 kegiatan | 271.857.644.371 |
| 10 | Kejaksaan Negeri Tanjung Perak | 0 kegiatan | 0 |
| 11 | Kejaksaan Negeri Jember | 0 kegiatan | 0 |
| 12 | Kejaksaan Negeri Bondowoso | 0 kegiatan | 0 |
| 13 | Kejaksaan Negeri Situbondo | 0 kegiatan | 0 |
| 14 | Kejaksaan Negeri Banyuwangi | 4 kegiatan | 12.996.000.000 |
| 15 | Kejaksaan Negeri Kota Kediri | 10 kegiatan | 43.376.088.000 |
| 16 | Kejaksaan Negeri Nganjuk | 0 kegiatan | 0 |
| 17 | Kejaksaan Negeri Blitar | 0 kegiatan | 0 |
| 18 | Kejaksaan Negeri Tulungagung | 0 kegiatan | 0 |
| 19 | Kejaksaan Negeri Trenggalek | 0 kegiatan | 0 |
| 20 | Kejaksaan Negeri Pamekasan | 0 kegiatan | 0 |
| 21 | Kejaksaan Negeri Bangkalan | 0 kegiatan | 0 |
| 22 | Kejaksaan Negeri Sumenep | 0 kegiatan | 0 |
| 23 | Kejaksaan Negeri Sampang | 0 kegiatan | 0 |
| 24 | Kejaksaan Negeri Kota Madiun | 0 kegiatan | 0 |
| 25 | Kejaksaan Negeri Ponorogo | 0 kegiatan | 0 |
| 26 | Kejaksaan Negeri Ngawi | 0 kegiatan | 0 |
| 27 | Kejaksaan Negeri Magetan | 10 kegiatan | 69.630.192.750 |
| 28 | Kejaksaan Negeri Pacitan | 0 kegiatan | 0 |
| 29 | Kejaksaan Negeri Kota Malang | 13 kegiatan | 48.822.535.009 |
| 30 | Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan | 0 kegiatan | 0 |
| 31 | Kejaksaan Negeri Lumajang | 0 kegiatan | 0 |
| 32 | Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo | 0 kegiatan | 0 |
| 33 | Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan | 31 kegiatan | 116.810.362.190 |
| 34 | Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo | 0 kegiatan | 0 |
| 35 | Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto | 0 kegiatan | 0 |
| 36 | Kejaksaan Negeri Kab. Malang | 4 kegiatan | 22.026.300.000 |
| 37 | Kejaksaan Negeri Batu | 0 kegiatan | 0 |
| 38 | Kejaksaan Negeri Kab. Kediri | 0 kegiatan | 0 |
| 39 | Kejaksaan Negeri Kab. Madiun | 0 kegiatan | 0 |
| JUMLAH | | 241 kegiatan | 3.450.893.110.710 |

3.3. Operasi Intelijen bidang IDPLEKSOSBUDHANKAM dan Prodin IT

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, tugas dan fungsi bidang intelijen Kejaksaan meliputi kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah untuk mendukung penegakan hukum di bidang

ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi informasi dan produksi intelijen serta penerangan hukum

Pada kegiatan IDPOLEKSOSBUDHANKAM dan Prodin IT sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur telah menerbitkan Surat Perintah sebanyak **892 (delapan ratus sembilan puluh dua)** serta telah melaporkan kegiatan tersebut dalam bentuk Laporan Operasi Intelijen sebanyak **384 (tiga ratus delapan puluh empat)** Laporan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 19
Jumlah Kegiatan Idpoleksosbudhankam dan Prodin IT
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

| No | SATKER | Jumlah Kegiatan Idpoleksosbudhankam dan Prodin IT Tahun 2023 | | | |
|----|-----------------------------------|--|--------|--------------------------------------|---------|
| | | Jumlah Surat Perintah s/d Triwulan III 2023 | | Jumlah Laporan s/d Triwulan III 2023 | |
| 1 | Kejaksaan Tinggi Jawa Timur | 195 | Sprint | 194 | Laporan |
| 2 | Kejaksaan Negeri Surabaya | 17 | Sprint | 13 | Laporan |
| 3 | Kejaksaan Negeri Kota Malang | 87 | Sprint | 1 | Laporan |
| 4 | Kejaksaan Negeri Jember | 86 | Sprint | 1 | Laporan |
| 5 | Kejaksaan Negeri Kota Kediri | 70 | Sprint | 2 | Laporan |
| 6 | Kejaksaan Negeri Kota Madiun | 10 | Sprint | 0 | Laporan |
| 7 | Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan | 12 | Sprint | 12 | Laporan |
| 8 | Kejaksaan Negeri Bojonegoro | 9 | Sprint | 9 | Laporan |
| 9 | Kejaksaan Negeri Bondowoso | 6 | Sprint | 4 | Laporan |
| 10 | Kejaksaan Negeri Pamekasan | 22 | Sprint | 2 | Laporan |
| 11 | Kejaksaan Negeri Sidoarjo | 15 | Sprint | 15 | Laporan |
| 12 | Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto | 20 | Sprint | 2 | Laporan |
| 13 | Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo | 23 | Sprint | 1 | Laporan |
| 14 | Kejaksaan Negeri Banyuwangi | 5 | Sprint | 5 | Laporan |
| 15 | Kejaksaan Negeri Blitar | 2 | Sprint | 2 | Laporan |
| 16 | Kejaksaan Negeri Jombang | 8 | Sprint | 8 | Laporan |
| 17 | Kejaksaan Negeri Ponorogo | 15 | Sprint | 3 | Laporan |
| 18 | Kejaksaan Negeri Gresik | 0 | Sprint | 0 | Laporan |
| 19 | Kejaksaan Negeri Lumajang | 3 | Sprint | 3 | Laporan |
| 20 | Kejaksaan Negeri Tulungagung | 18 | Sprint | 18 | Laporan |
| 21 | Kejaksaan Negeri Trenggalek | 2 | Sprint | 2 | Laporan |
| 22 | Kejaksaan Negeri Nganjuk | 18 | Sprint | 8 | Laporan |
| 23 | Kejaksaan Negeri Magetan | 4 | Sprint | 1 | Laporan |
| 24 | Kejaksaan Negeri Tuban | 8 | Sprint | 8 | Laporan |
| 25 | Kejaksaan Negeri Ngawi | 5 | Sprint | 5 | Laporan |
| 26 | Kejaksaan Negeri Sumenep | 10 | Sprint | 2 | Laporan |
| 27 | Kejaksaan Negeri Lamongan | 11 | Sprint | 1 | Laporan |
| 28 | Kejaksaan Negeri Sampang | 10 | Sprint | 2 | Laporan |
| 29 | Kejaksaan Negeri Bangkalan | 5 | Sprint | 5 | Laporan |
| 30 | Kejaksaan Negeri Pacitan | 9 | Sprint | 9 | Laporan |
| 31 | Kejaksaan Negeri Situbondo | 2 | Sprint | 2 | Laporan |
| 32 | Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan | 7 | Sprint | 7 | Laporan |
| 33 | Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo | 2 | Sprint | 2 | Laporan |
| 34 | Kejaksaan Negeri Tanjung Perak | 25 | Sprint | 25 | Laporan |
| 35 | Kejaksaan Negeri Kab. Malang | 118 | Sprint | 3 | Laporan |

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------|------------|--------|------------|---------|
| 36 | Kejaksaan Negeri Batu | 23 | Sprint | 3 | Laporan |
| 37 | Kejaksaan Negeri Kab. Kediri | 3 | Sprint | 3 | Laporan |
| 38 | Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto | 6 | Sprint | 1 | Laporan |
| 39 | Kejaksaan Negeri Kab. Madiun | 1 | Sprint | 0 | Laporan |
| JUMLAH | | 892 | Sprint | 384 | Laporan |

3.4. Penerangan Hukum

Pelaksanaan Penerangan hukum sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur sebanyak **298 (dua ratus sembilan puluh delapan)** kegiatan dengan total instansi yang dilibatkan sebanyak **298 (dua ratus sembilan puluh delapan)** Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Jumlah tersebut telah melampaui target yang ditentukan sebanyak **80 (delapan puluh)** kegiatan yaitu 372,5% sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 20
Kegiatan Penerangan Hukum sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023
Satuan Kerja Kejaksaan se Jawa Timur

| No | SATKER | Jumlah Kegiatan Penerangan Hukum Tahun 2023 | | | |
|----|-------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | Target Tahun 2023 | Terlaksana s.d Triwulan IV | Jumlah Kementerian/ Lembaga/ SKPD | Jumlah Audiensi |
| 1 | Kejati Jawa Timur | 4 Kegiatan | 5 Kegiatan | 5 K/L/SKPD | 5800 Orang |
| 2 | Kejari Surabaya | 2 Kegiatan | 1 kegiatan | 1 K/L/SKPD | 100 Orang |
| 3 | Kejari Kota Malang | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 K/L/SKPD | 100 Orang |
| 4 | Kejari Jember | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 K/L/SKPD | 50 Orang |
| 5 | Kejari Kota Kediri | 2 Kegiatan | 12 Kegiatan | 12 K/L/SKPD | 444 Orang |
| 6 | Kejari Kota Madiun | 2 Kegiatan | 49 Kegiatan | 49 K/L/SKPD | 65 Orang |
| 7 | Kejari Kota Pasuruhan | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 K/L/SKPD | 50 Orang |
| 8 | Kejari Bojonegoro | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 K/L/SKPD | 150 Orang |
| 9 | Kejari Bondowoso | 2 Kegiatan | 18 Kegiatan | 18 K/L/SKPD | 1210 Orang |
| 10 | Kejari Pamekasan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 K/L/SKPD | 40 Orang |
| 11 | Kejari Sidoarjo | 2 Kegiatan | 12 Kegiatan | 5 K/L/SKPD | 100 Orang |
| 12 | Kejari Kab. Mojokerto | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 K/L/SKPD | 1200 Orang |
| 13 | Kejari Kota Probolinggo | 2 Kegiatan | 3 Kegiatan | 3 K/L/SKPD | 55 Orang |
| 14 | Kejari Banyuwangi | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 K/L/SKPD | 100 Orang |
| 15 | Kejari Blitar | 2 Kegiatan | 75 Kegiatan | 75 K/L/SKPD | 1956 Orang |
| 16 | Kejari Jombang | 2 Kegiatan | 3 Kegiatan | 3 K/L/SKPD | 400 Orang |
| 17 | Kejari Ponorogo | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 K/L/SKPD | 135 Orang |
| 18 | Kejari Gresik | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 K/L/SKPD | 36 Orang |
| 19 | Kejari Lumajang | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 K/L/SKPD | 350 Orang |
| 20 | Kejari Tulungagung | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 K/L/SKPD | 110 Orang |
| 21 | Kejari Trenggalek | 2 Kegiatan | 4 Kegiatan | 4 K/L/SKPD | 121 Orang |
| 22 | Kejari Nganjuk | 2 Kegiatan | 9 Kegiatan | 9 K/L/SKPD | 492 Orang |
| 23 | Kejari Magetan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 K/L/SKPD | 100 Orang |
| 24 | Kejari Tuban | 2 Kegiatan | 9 Kegiatan | 9 K/L/SKPD | 840 Orang |
| 25 | Kejari Ngawi | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 K/L/SKPD | 170 Orang |
| 26 | Kejari Sumenep | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 K/L/SKPD | 200 Orang |
| 27 | Kejari Lamongan | 2 Kegiatan | 3 Kegiatan | 3 K/L/SKPD | 150 Orang |
| 28 | Kejari Sampang | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 K/L/SKPD | 182 Orang |
| 29 | Kejari Bangkalan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 K/L/SKPD | 40 Orang |
| 30 | Kejari Pacitan | 2 Kegiatan | 27 Kegiatan | 27 K/L/SKPD | 1093 Orang |
| 31 | Kejari Situbondo | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 K/L/SKPD | 50 Orang |
| 32 | Kejari Kab. Pasuruan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 K/L/SKPD | 76 Orang |
| 33 | Kejari Kab. Probolinggo | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 K/L/SKPD | 50 Orang |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 34 | Kejari Tanjung Perak | 2 Kegiatan | 3 Kegiatan | 3 K/L/SKPD | 180 Orang |
| 35 | Kejari Kab. Malang | 2 Kegiatan | 38 Kegiatan | 38 K/L/SKPD | 190 Orang |
| 36 | Kejari Batu | 2 Kegiatan | 4 Kegiatan | 4 K/L/SKPD | 290 Orang |
| 37 | Kejari Kab. Kediri | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 K/L/SKPD | 142 Orang |
| 38 | Kejari Kota Mojokerto | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 K/L/SKPD | 50 Orang |
| 39 | Kejari Kab. Madiun | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 K/L/SKPD | 50 Orang |
| JUMLAH | | 80 Kegiatan | 298 Kegiatan | 298 K/L/SKPD | 15.817 Orang |

3.5. Jaksa Masuk Sekolah

Jaksa Masuk Sekolah atau disingkat JMS peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan sasaran para pelajar sejak dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah maupun Perguruan Tinggi serta tenaga pelajar / pendidik dan komite sekolah. Program tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan anti KKN sejak usia dini hingga diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berintegritas. Kejaksanaan memandang bahwa pelajar merupakan gerbong utama dari suatu generasi muda yang mempunyai posisi dan peran strategis dalam pembangunan yang akan menentukan arah dan tujuan suatu negara di masa yang akan datang, artinya masa depan suatu bangsa dan negara akan ditentukan dari kesiapan dan kemampuan serta kualitas dari para pelajarnya.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 dari target sebanyak **164 kegiatan** Jaksa Masuk Sekolah, telah berhasil dilaksanakan sebanyak **312 kegiatan** atau telah mencapai 190,24 % dari target yang ditentukan, dengan audiens sebanyak **58.214 orang** pelajar.

Tabel 21
Jumlah Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah

| NO. | SATKER | Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah Tahun 2023 | | |
|-----|-------------------------|---|----------------------------|----------------|
| | | Target 2023 | Terlaksana s.d Triwulan IV | Jumlah Audiens |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kejati Jawa Timur | 8 Kegiatan | 4 Kegiatan | 4.000 Orang |
| 2 | Kejari Surabaya | 8 Kegiatan | 12 Kegiatan | 400 Orang |
| 3 | Kejari Kota Malang | 4 Kegiatan | 8 Kegiatan | 300 Orang |
| 4 | Kejari Jember | 4 Kegiatan | 2 Kegiatan | 400 Orang |
| 5 | Kejari Kota Kediri | 4 Kegiatan | 8 Kegiatan | 2.557 Orang |
| 6 | Kejari Kota Madiun | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 548 Orang |
| 7 | Kejari Kota Pasuruan | 4 Kegiatan | 3 Kegiatan | 0 Orang |
| 8 | Kejari Bojonegoro | 4 Kegiatan | 7 Kegiatan | 400 Orang |
| 9 | Kejari Bondowoso | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 380 Orang |
| 10 | Kejari Pamekasan | 4 Kegiatan | 0 Kegiatan | 200 Orang |
| 11 | Kejari Sidoarjo | 4 Kegiatan | 3 Kegiatan | 200 Orang |
| 12 | Kejari Kab. Mojokerto | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 200 Orang |
| 13 | Kejari Kota Probolinggo | 4 Kegiatan | 3 Kegiatan | 475 Orang |
| 14 | Kejari Banyuwangi | 4 Kegiatan | 3 Kegiatan | 507 Orang |
| 15 | Kejari Blitar | 4 Kegiatan | 9 Kegiatan | 10.132 Orang |
| 16 | Kejari Jombang | 4 Kegiatan | 7 Kegiatan | 1.350 Orang |

| | | | | |
|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 17 | Kejari Ponorogo | 4 Kegiatan | 3 Kegiatan | 237 Orang |
| 18 | Kejari Gresik | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 2.023 Orang |
| 19 | Kejari Lumajang | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 1.400 Orang |
| 20 | Kejari Tulungagung | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 13.123 Orang |
| 21 | Kejari Trenggalek | 4 Kegiatan | 9 Kegiatan | 200 Orang |
| 22 | Kejari Nganjuk | 4 Kegiatan | 1 Kegiatan | 5.974 Orang |
| 23 | Kejari Magetan | 4 Kegiatan | 2 Kegiatan | 200 Orang |
| 24 | Kejari Tuban | 4 Kegiatan | 1 Kegiatan | 500 Orang |
| 25 | Kejari Ngawi | 4 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1.295 Orang |
| 26 | Kejari Sumenep | 4 Kegiatan | 2 Kegiatan | 750 Orang |
| 27 | Kejari Lamongan | 4 Kegiatan | 13 Kegiatan | 416 Orang |
| 28 | Kejari Sampang | 4 Kegiatan | 2 Kegiatan | 690 Orang |
| 29 | Kejari Bangkalan | 4 Kegiatan | 8 Kegiatan | 200 Orang |
| 30 | Kejari Pacitan | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 1.035 Orang |
| 31 | Kejari Situbondo | 4 Kegiatan | 6 Kegiatan | 394 Orang |
| 32 | Kejari Kab. Pasuruan | 4 Kegiatan | 22 Kegiatan | 249 Orang |
| 33 | Kejari Kab. Probolinggo | 4 Kegiatan | 5 Kegiatan | 225 Orang |
| 34 | Kejari Tanjung Perak | 4 Kegiatan | 5 Kegiatan | 310 Orang |
| 35 | Kejari Kab. Malang | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 3.600 Orang |
| 36 | Kejari Batu | 4 Kegiatan | 5 Kegiatan | 975 Orang |
| 37 | Kejari Kab. Kediri | 4 Kegiatan | 6 Kegiatan | 950 Orang |
| 38 | Kejari Kota Mojokerto | 4 Kegiatan | 1 Kegiatan | 200 Orang |
| 39 | Kejari Kab. Madiun | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 1.219 Orang |
| JUMLAH | | 164 Kegiatan | 312 Kegiatan | 58.214 orang |

3.4. Jaksa Menyapa

Program siaran Radio Dialog Interaktif Jaksa Menyapa lahir dari pemikiran bahwa diperlukan langkah proaktif yang mampu menjangkau masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran serta mendukung kebijakan penegak hukum serta mewujudkan kehadiran insitusi Kejaksaan dalam membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan program tersebut dirasakan efektif dalam menjangkau berbagai kalangan termasuk usia sekolah dan mahasiswa sebagai generasi milenial serta diharapkan dapat menjadi sarana yang tepat guna menyebarluaskan infomasi publik terkait kinerja dan kebijakan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 dari target sebanyak **79 kegiatan** siaran Jaksa Menyapa, telah dilaksanakan sebanyak **92 kegiatan** atau sebesar **116,45%** dari target yang ditentukan, melalui kerja sama dengan 12 Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya, Malang, Jember, Madiun serta beberapa Stasiun Radio Lokal di berbagai daerah di Jawa Timur.

Tabel 22
Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa

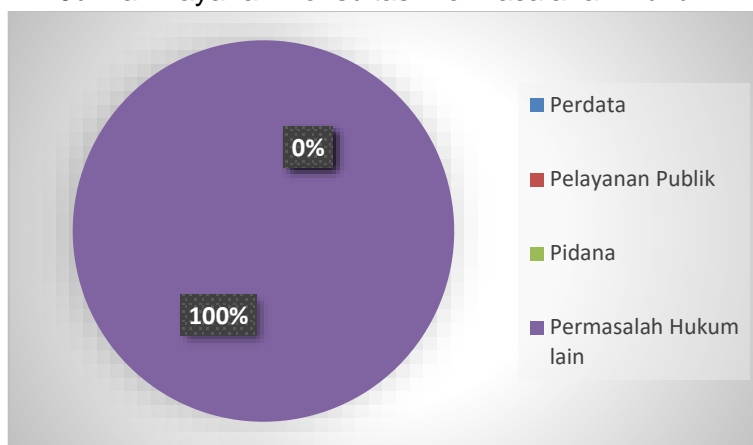
| NO. | SATKER | Kegiatan Jaksa Menyapa Tahun 2023 | | |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | Target 2023 | Terlaksana s.d Triwulan IV | Jumlah Kerja Sama Stasiun TV/Radio |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kejati Jawa Timur | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 2 | Kejari Surabaya | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 3 | Kejari Kota Malang | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 4 | Kejari Jember | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 5 | Kejari Kota Kediri | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 6 | Kejari Kota Madiun | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Stasiun Radio |
| 7 | Kejari Kota Pasuruan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 8 | Kejari Bojonegoro | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 9 | Kejari Bondowoso | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 10 | Kejari Pamekasan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 11 | Kejari Sidoarjo | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 12 | Kejari Kab. Mojokerto | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 13 | Kejari Kota Probolinggo | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 14 | Kejari Banyuwangi | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 15 | Kejari Blitar | 2 Kegiatan | 6 Kegiatan | 2 Stasiun Radio |
| 16 | Kejari Jombang | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 17 | Kejari Ponorogo | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 18 | Kejari Gresik | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 19 | Kejari Lumajang | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 20 | Kejari Tulungagung | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 21 | Kejari Trenggalek | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 22 | Kejari Nganjuk | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 23 | Kejari Magetan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 24 | Kejari Tuban | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 25 | Kejari Ngawi | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 26 | Kejari Sumenep | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 27 | Kejari Lamongan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 28 | Kejari Sampang | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 29 | Kejari Bangkalan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 30 | Kejari Pacitan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 31 | Kejari Situbondo | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 32 | Kejari Kab. Pasuruan | 2 Kegiatan | 3 Kegiatan | 2 Stasiun Radio |
| 33 | Kejari Kab. Probolinggo | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Stasiun Radio |
| 34 | Kejari Tanjung Perak | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 35 | Kejari Kab. Malang | 2 Kegiatan | 5 Kegiatan | 3 Stasiun Radio |
| 36 | Kejari Batu | 2 Kegiatan | 5 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 37 | Kejari Kab. Kediri | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 38 | Kejari Kota Mojokerto | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| 39 | Kejari Kab. Madiun | 2 Kegiatan | 4 Kegiatan | 1 Stasiun Radio |
| JUMLAH | | 79 Kegiatan | 92 Kegiatan | 36 Stasiun Radio |

3.5. Pelayanan Hukum Gratis

Pelayanan hukum merupakan salah satu wujud kegiatan bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat berupa konsultasi secara Cuma-Cuma mengenai permasalahan di bidang keperdataan, pelayanan publik dan administrasi pemerintah, maupun terkait permasalahan hukum lainnya.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, tercatat sebanyak 790 layanan konsultasi permasalahan hukum yang dilakukan oleh jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan se Jawa Timur, terdiri dari 790 konsultasi terkait permasalahan hukum lainnya sedangkan untuk permasalahan hukum perdata, pelayanan publik/administrasi pemerintahan, dan permasalahan hukum pidana masih nihil.

Diagram 6
Jumlah Layanan Konsultasi Permasalahan Hukum



Tabel 23
Kegiatan Pelayanan Hukum Gratis
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

| NO. | Satker | Perdata | Pelayanan Publik/Administrasi Pemerintahan | Pidana | Permasalahan Hukum Lainnya | Jumlah |
|-----|--------------------------|------------|--|------------|----------------------------|-------------|
| 1. | Kejati Jawa Timur | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 66 Kegiatan | 66 Kegiatan |
| 2. | Kn. Surabaya | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 67 Kegiatan | 67 Kegiatan |
| 3. | Kn. Tanjung Perak | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 21 Kegiatan | 21 Kegiatan |
| 4. | Kn. Gresik | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 14 Kegiatan | 14 Kegiatan |
| 5. | Kn. Sidoarjo | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 21 Kegiatan | 21 Kegiatan |
| 6. | Kn. Kota Mojokerto | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 11 Kegiatan | 11 Kegiatan |
| 7. | Kn. Kab. Mojokerto | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan |
| 8. | Kn. Kota Malang | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan |
| 9. | Kn. Lumajang | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 25 Kegiatan | 25 Kegiatan |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 10. | Kn. Kota Pasuruan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 76 Kegiatan | 76 Kegiatan |
| 11. | Kn. Kab. Pasuruan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 16 Kegiatan | 16 Kegiatan |
| 12. | Kn. Kota Probolinggo | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 21 Kegiatan | 21 Kegiatan |
| 13. | Kn. Kab. Probolinggo | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 57 Kegiatan | 57 Kegiatan |
| 14. | Kn. Kab. Malang | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 17 Kegiatan | 17 Kegiatan |
| 15. | Kn. Batu | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 27 Kegiatan | 27 Kegiatan |
| 16. | Kn. Kota Madiun | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 14 Kegiatan | 14 Kegiatan |
| 17. | Kn. Kab. Madiun | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 7 Kegiatan | 7 Kegiatan |
| 18. | Kn. Ngawi | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 14 Kegiatan | 14 Kegiatan |
| 19. | Kn. Magetan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 9 Kegiatan | 9 Kegiatan |
| 20. | Kn. Ponorogo | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 13 Kegiatan | 13 Kegiatan |
| 21. | Kn. Pacitan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 Kegiatan | 0 Kegiatan |
| 22. | Kn. Kota Kediri | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan |
| 23. | Kn. Kab. Kediri | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 21 Kegiatan | 21 Kegiatan |
| 24. | Kn. Nganjuk | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan |
| 25. | Kn. Blitar | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan |
| 26. | Kn. Tulung Agung | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 40 Kegiatan | 40 Kegiatan |
| 27. | Kn. Trenggalek | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 39 Kegiatan | 39 Kegiatan |
| 28. | Kn. Bojonegoro | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 15 Kegiatan | 15 Kegiatan |
| 29. | Kn. Tuban | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 76 Kegiatan | 76 Kegiatan |
| 30. | Kn. Lamongan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan |
| 31. | Kn. Jombang | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 33 Kegiatan | 33 Kegiatan |
| 32. | Kn. Jember | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 Kegiatan | 0 Kegiatan |
| 33. | Kn. Banyuwangi | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 Kegiatan | 0 Kegiatan |
| 34. | Kn. Situbondo | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 10 Kegiatan | 10 Kegiatan |
| 35. | Kn. Bondowoso | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan |
| 36. | Kn. Pamekasan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan |
| 37. | Kn. Sumenep | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 16 Kegiatan | 16 Kegiatan |
| 38. | Kn. Sampang | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan |
| 39. | Kn. Bangkalan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 10 Kegiatan | 10 Kegiatan |
| Jumlah | | 0 Kegiatan | 0 Kegiatan | 0 Kegiatan | 790 Kegiatan | 790 Kegiatan |

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

$$\frac{2.625}{787} \times 100 = 333,54 \%$$

Persentase tersebut di atas telah mencapai target indikator kinerja persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023 yaitu 333,54 %.

Berdasarkan uraian terkait kegiatan-kegiatan di bidang upaya pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Bahwa sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 kepercayaan masyarakat terhadap Program Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan se Jawa Timur masih sangat tinggi, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya jumlah kegiatan dan anggaran yang dimohonkan oleh Kementerian/Lembaga kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan seluruh Kejaksaan Negeri di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yaitu sebanyak **241 kegiatan** dengan pagu anggaran yang dikawal sebesar **Rp. 3.450.893.110.710** (tiga triliun empat ratus lima puluh milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta serratus sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
Namun demikian jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan dirasakan belum maksimal hal ini disebabkan antara lain :
 - a. Tidak tersedianya anggaran Program Pengamanan Pembangunan Strategis pada tingkat Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Negeri.
 - b. Penerimaan permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dilakukan secara lebih selektif dan terbatas untuk pembangunan strategis.
2. Kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat antara lain penerangan hukum dan penyuluhan hukum (Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Menyapa) yang telah melampaui target ini merupakan dampak dari antusiasme masyarakat terhadap pemahaman tentang hukum di Indonesia serta sebagai wujud nyata bentuk kinerja Kejaksaan di Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

SASARAN STRATEGIS 4 :

MENINGKATNYA KEBERHASILAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

Pencapaian sasaran strategis IV diukur dari Indikator Kinerja berupa :

Tabel 24

Indikator Kinerja dan target dari Sasaran Strategis IV

| Indikator Kinerja | Target |
|--|--------|
| 1. Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi. | 97% |
| 2. Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi. | 85% |

Pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tahap akhir dari berkerjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menepati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, karena rentang tugasnya meliputi sejak tahap awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Di tahap Penyidikan, Jaksa selaku Penuntut Umum bertugas menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), mengikuti jalannya Penyidikan, memberikan perpanjangan penahanan yang diajukan penyidik, melakukan pra Penuntutan dan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara, dan dalam hal-hal tertentu melakukan pemeriksaan tambahan.
2. Di Tahap Penuntutan, Penuntutan Umum bertugas menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan;
3. Di tahap persidangan, Penuntut Umum bertugas menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, membuktikan dakwaan dan melakukan penetapan-penetapan hakim;
4. Di tahap putusan pengadilan, Penuntut Umum turut melaksanakan pengawasan terhadap putusan pengadilan dengan adanya hak untuk mengajukan upaya hukum;
5. Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4.1. Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.

Pada sampai pada periode Triwulan IV Tahun 2023 terdapat 17.467 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur dari Penyidik (Polri, PPNS dan Penyidikan Lainnya) diseluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Selanjutnya pada tahap I, 13.515 berkas perkara yang diterima dari penyidik, dari jumlah tersebut sebanyak 13.815 perkara telah dinyatakan lengkap dan sebanyak 14.154 perkara telah diputus oleh Pengadilan Negeri.

Tabel 25

Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahap Pra Penuntutan
Periode Triwulan IV Tahun 2023:

| No. | Satuan Kerja | SPDP | Tahap I | Penuntutan |
|-----|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Kejaksaan Tinggi Jawa Timur | 918 | 706 | 681 |
| 2 | Kejaksaan Negeri Surabaya | 1.335 | 1.158 | 1.174 |
| 3 | Kejaksaan Negeri Kota Malang | 570 | 398 | 390 |
| 4 | Kejaksaan Negeri Jember | 885 | 700 | 704 |
| 5 | Kejaksaan Negeri Kota Kediri | 235 | 198 | 195 |
| 6 | Kejaksaan Negeri Kota Madiun | 169 | 145 | 148 |
| 7 | Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan | 152 | 129 | 142 |
| 8 | Kejaksaan Negeri Bojonegoro | 329 | 231 | 226 |
| 9 | Kejaksaan Negeri Bondowoso | 271 | 225 | 226 |
| 10 | Kejaksaan Negeri Pamekasan | 279 | 162 | 143 |
| 11 | Kejaksaan Negeri Sidoarjo | 1.086 | 779 | 852 |
| 12 | Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto | 377 | 289 | 333 |
| 13 | Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo | 168 | 111 | 108 |
| 14 | Kejaksaan Negeri Banyuwangi | 690 | 527 | 528 |
| 15 | Kejaksaan Negeri Blitar | 467 | 398 | 419 |
| 16 | Kejaksaan Negeri Jombang | 435 | 387 | 409 |
| 17 | Kejaksaan Negeri Ponorogo | 203 | 171 | 174 |
| 18 | Kejaksaan Negeri Gresik | 529 | 371 | 421 |
| 19 | Kejaksaan Negeri Lumajang | 409 | 303 | 319 |
| 20 | Kejaksaan Negeri Tulung Agung | 339 | 292 | 279 |
| 21 | Kejaksaan Negeri Trenggalek | 155 | 129 | 119 |
| 22 | Kejaksaan Negeri Nganjuk | 327 | 241 | 243 |
| 23 | Kejaksaan Negeri Magetan | 191 | 165 | 172 |
| 24 | Kejaksaan Negeri Tuban | 367 | 251 | 263 |
| 25 | Kejaksaan Negeri Ngawi | 324 | 176 | 185 |
| 26 | Kejaksaan Negeri Sumenep | 300 | 263 | 267 |
| 27 | Kejaksaan Negeri Lamongan | 268 | 196 | 209 |
| 28 | Kejaksaan Negeri Sampang | 344 | 256 | 257 |
| 29 | Kejaksaan Negeri Bangkalan | 364 | 265 | 283 |
| 30 | Kejaksaan Negeri Pacitan | 88 | 68 | 64 |
| 31 | Kejaksaan Negeri Situbondo | 297 | 208 | 210 |
| 32 | Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan | 679 | 489 | 477 |
| 33 | Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo | 372 | 287 | 306 |
| 34 | Kejaksaan Negeri Tanjung Perak | 1.561 | 1.395 | 1.384 |
| 35 | Kejaksaan Negeri Kab. Malang | 795 | 556 | 600 |
| 36 | Kejaksaan Negeri Batu | 167 | 116 | 118 |
| 37 | Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri | 492 | 431 | 475 |
| 38 | Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto | 302 | 179 | 181 |
| 39 | Kejaksaan Negeri Kab. Madiun | 228 | 164 | 131 |
| | TOTAL | 17.467 | 13.515 | 13.815 |

Putusan dianggap berkekuatan hukum tetap apabila :

- 1). Terdakwa atau Penuntut Umum menyatakan menerima putusan pengadilan tersebut baik secara terbuka di muka umum pengadilan, maupun setelah jangka waktu yang ditentukan tidak mengajukan upaya hukum ; atau
- 2). Terhadap putusan dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan upaya hukum.

Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana umum
Berdasarkan Putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak)
dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah
hukum Kejaksaan Tinggi.}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana umum
Berdasarkan Putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak)
di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.}} \times 100$$

Sampai pada periode Triwulan IV Tahun 2023 terdapat 14.154 perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan jumlah pelaksanaan eksekusi pidana badan mencapai 14.154 perkara atau sebesar 100 % dari total keseluruhan perkara yang berkekuatan hukum tetap.

$$\frac{14.154}{14.154} \times 100 = 100 \%$$

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan persentase perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah mencapai target yaitu 97 %.

Adapun jumlah pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap per Satker dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 26
Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Umum
Yang Berkekuatan Hukum Tetap periode sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 :

| No. | Satuan Kerja | Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap | Putusan yang telah di Eksekusi | |
|--------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| | | | Badan (orang) | Barang Bukti (unit) |
| 1 | Kejaksaan Tinggi Jawa Timur | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kejaksaan Negeri Surabaya | 1430 | 1430 | 901 |
| 3 | Kejaksaan Negeri Kota Malang | 439 | 439 | 342 |
| 4 | Kejaksaan Negeri Jember | 982 | 982 | 598 |
| 5 | Kejaksaan Negeri Kota Kediri | 222 | 222 | 128 |
| 6 | Kejaksaan Negeri Kota Madiun | 186 | 186 | 148 |
| 7 | Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan | 178 | 178 | 142 |
| 8 | Kejaksaan Negeri Bojonegoro | 299 | 299 | 203 |
| 9 | Kejaksaan Negeri Bondowoso | 214 | 214 | 156 |
| 10 | Kejaksaan Negeri Pamekasan | 184 | 184 | 133 |
| 11 | Kejaksaan Negeri Sidoarjo | 571 | 571 | 408 |
| 12 | Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto | 463 | 463 | 321 |
| 13 | Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo | 129 | 129 | 82 |
| 14 | Kejaksaan Negeri Banyuwangi | 681 | 681 | 506 |
| 15 | Kejaksaan Negeri Blitar | 512 | 512 | 375 |
| 16 | Kejaksaan Negeri Jombang | 582 | 582 | 446 |
| 17 | Kejaksaan Negeri Ponorogo | 166 | 166 | 117 |
| 18 | Kejaksaan Negeri Gresik | 572 | 572 | 327 |
| 19 | Kejaksaan Negeri Lumajang | 365 | 365 | 273 |
| 20 | Kejaksaan Negeri Tulungagung | 361 | 361 | 268 |
| 21 | Kejaksaan Negeri Trenggalek | 103 | 103 | 79 |
| 22 | Kejaksaan Negeri Nganjuk | 271 | 271 | 149 |
| 23 | Kejaksaan Negeri Magetan | 146 | 146 | 103 |
| 24 | Kejaksaan Negeri Tuban | 275 | 275 | 154 |
| 25 | Kejaksaan Negeri Ngawi | 181 | 181 | 129 |
| 26 | Kejaksaan Negeri Sumenep | 317 | 317 | 216 |
| 27 | Kejaksaan Negeri Lamongan | 229 | 229 | 175 |
| 28 | Kejaksaan Negeri Sampang | 272 | 272 | 206 |
| 29 | Kejaksaan Negeri Bangkalan | 270 | 270 | 179 |
| 30 | Kejaksaan Negeri Pacitan | 84 | 84 | 47 |
| 31 | Kejaksaan Negeri Situbondo | 219 | 219 | 147 |
| 32 | Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan | 351 | 351 | 255 |
| 33 | Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo | 354 | 354 | 268 |
| 34 | Kejaksaan Negeri Tanjung Perak | 1.082 | 1.082 | 799 |
| 35 | Kejaksaan Negeri Kab. Malang | 662 | 662 | 489 |
| 36 | Kejaksaan Negeri Batu | 134 | 134 | 97 |
| 37 | Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri | 178 | 178 | 145 |
| 38 | Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto | 260 | 260 | 179 |
| 39 | Kejaksaan Negeri Kab. Madiun | 230 | 230 | 149 |
| TOTAL | | 14.154 | 14.154 | 9.839 |

Restorative Justice adalah sebuah pendekatan dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan dengan menggelar pertemuan antara korban, pelaku, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum. Tujuannya adalah untuk saling bermusyawarah mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban untuk kemudian dicari jalan tengah dengan menciptakan kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Kondisi ini biasanya dicapai melalui pemberian ganti rugi kepada korban, permintaan maaf, atau

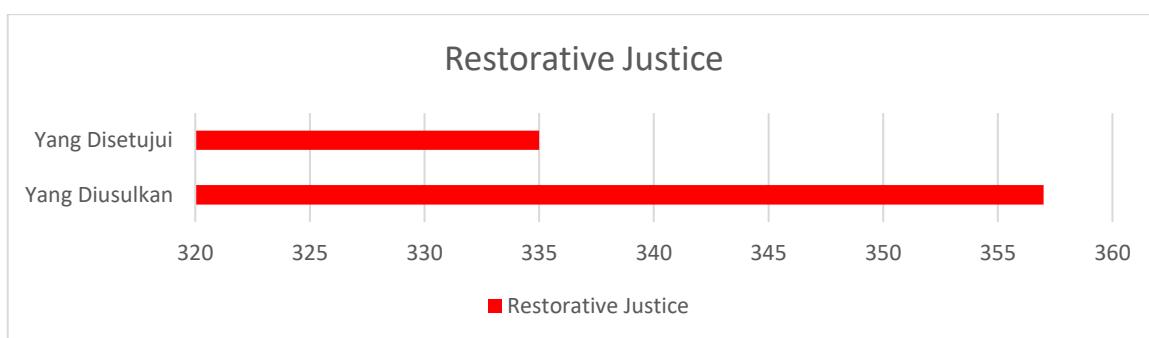
tindakan-tindakan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap kegagalan sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sesuai pada Pasal 1 (ayat 1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Tabel 27
Rekapitulasi Pelaksanaan Restorative Justice
Tahun 2023

| No. | Satuan Kerja | Perkara Diusulkan | Perkara Disetujui/Diselesaikan |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | Kejaksaan Tinggi Jawa Timur | 0 | 0 |
| 2 | Kejaksaan Negeri Surabaya | 90 | 87 |
| 3 | Kejaksaan Negeri Bojonegoro | 4 | 3 |
| 4 | Kejaksaan Negeri Kota Malang | 10 | 9 |
| 5 | Kejaksaan Negeri Blitar | 12 | 11 |
| 6 | Kejaksaan Negeri Tulungagung | 3 | 3 |
| 7 | Kejaksaan Negeri Sidoarjo | 22 | 19 |
| 8 | Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto | 19 | 18 |
| 9 | Kejaksaan Negeri Nganjuk | 6 | 5 |
| 10 | Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto | 5 | 5 |
| 11 | Kejaksaan Negeri Jember | 8 | 7 |
| 12 | Kejaksaan Negeri Situbondo | 4 | 3 |
| 13 | Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan | 8 | 6 |
| 14 | Kejaksaan Negeri Trenggalek | 3 | 3 |
| 15 | Kejaksaan Negeri Kab. Kediri | 4 | 4 |
| 16 | Kejaksaan Negeri Sumenep | 11 | 11 |
| 17 | Kejaksaan Negeri Tanjung Perak | 58 | 55 |
| 18 | Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo | 6 | 6 |
| 19 | Kejaksaan Negeri Kab. Malang | 11 | 11 |
| 20 | Kejaksaan Negeri Sampang | 4 | 4 |
| 21 | Kejaksaan Negeri Kab. Madiun | 3 | 2 |
| 22 | Kejaksaan Negeri Gresik | 6 | 6 |
| 23 | Kejaksaan Negeri Batu | 4 | 4 |
| 24 | Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan | 4 | 3 |
| 25 | Kejaksaan Negeri Kota Madiun | 2 | 2 |
| 26 | Kejaksaan Negeri Jombang | 2 | 2 |
| 27 | Kejaksaan Negeri Lamongan | 6 | 5 |
| 28 | Kejaksaan Negeri Lumajang | 3 | 3 |
| 29 | Kejaksaan Negeri Magetan | 3 | 3 |
| 30 | Kejaksaan Negeri Tuban | 6 | 6 |
| 31 | Kejaksaan Negeri Ponorogo | 3 | 3 |
| 32 | Kejaksaan Negeri Ngawi | 3 | 3 |
| 33 | Kejaksaan Negeri Kota Kediri | 1 | 1 |
| 34 | Kejaksaan Negeri Kab Probolinggo | 5 | 5 |
| 35 | Kejaksaan Negeri Bangkalan | 7 | 7 |
| 36 | Kejaksaan Negeri Pacitan | 2 | 1 |
| 37 | Kejaksaan Negeri Banyuwangi | 3 | 3 |
| 38 | Kejaksaan Negeri Bondowoso | 4 | 4 |
| 39 | Kejaksaan Negeri Pamekasan | 2 | 2 |
| TOTAL | | 357 | 335 |

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah mengusulkan Restorative Justice sebanyak **357 perkara** dan yang dapat direstorasi atau yang dapat disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum adalah sebanyak **335 perkara**, hal tersebut dikarenakan kurang memenuhi beberapa persyaratan kumulatif, antara lain: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Diagram 7
Perkara Restorative Justice
yang telah diusulkan dan yang dapat disetujui



4.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, maka selain kedudukannya sebagai Penuntut Umum untuk seluruh perkara pidana, Kejaksaan juga melakukan fungsi sebagai penyidik perkara tindak pidana tertentu, yaitu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

Adapun kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam pemberantasan korupsi pada kurun waktu Januari s.d. Desember 2023 (Triwulan IV) secara statistik berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 28
Rekapitulasi Penanganan Lapdu, Lid, Dik, Pra Tut, Penuntutan, Eksekusi
Perkara Tipikor dan TPPU
Triwulan IV Tahun 2023

| No | Satuan Kerja | Lapdu | | | Penyelidikan | | | Penyidikan | | | Pra Penuntutan | | | Penuntutan | | | Eksekusi Badan (Orang) | | |
|----|----------------------|-----------|---------|--------|--------------|---------|--------|------------|---------|--------|----------------|---------|--------|------------|---------|--------|------------------------|---------|--------|
| | | Ditangani | Selesai | % | Ditangani | Selesai | % | Ditangani | Selesai | % | Ditangani | Selesai | % | Ditangani | Selesai | % | Ditangani | Selesai | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | KT. Jawa Timur | 137 | 137 | 100,00 | 13 | 13 | 100,00 | 11 | 11 | 100,00 | 13 | 13 | 100,00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2 | KN. Surabaya | 0 | 0 | - | 13 | 13 | 100,00 | 12 | 12 | 100,00 | 10 | 10 | 100,00 | 19 | 19 | 100,00 | 18 | 18 | 100,00 |
| 3 | KN. Sidoarjo | 29 | 29 | 100,00 | 29 | 29 | 100,00 | 18 | 18 | 100,00 | 12 | 12 | 100,00 | 7 | 7 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 |
| 4 | KN. Tanjung Perak | 6 | 6 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 6 | 6 | 100,00 | 5 | 5 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 |
| 5 | KN. Gresik | 3 | 3 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 |
| 6 | KN. Kota Mojokerto | 4 | 4 | 100,00 | 5 | 5 | 100,00 | 6 | 6 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 7 | 7 | 100,00 |
| 7 | KN. Kab.Mojokerto | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 5 | 5 | 100,00 |
| 8 | KN. Jombang | 7 | 7 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 5 | 5 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 |
| 9 | KN. Kota Malang | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 |
| 10 | KN. Kab Malang | 10 | 10 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 |
| 11 | KN. Batu | 5 | 5 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 | 8 | 8 | 100,00 |
| 12 | KN. Kota Pasuruan | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 10 | 10 | 100,00 |
| 13 | KN. Kab Pasuruan | 5 | 5 | 100,00 | 5 | 5 | 100,00 | 7 | 7 | 100,00 | 8 | 8 | 100,00 | 6 | 6 | 100,00 | 9 | 9 | 100,00 |
| 14 | KN. Kota Probolinggo | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 |
| 15 | KN. Kab Probolinggo | 5 | 5 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 |
| 16 | KN. Lumajang | 1 | 1 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 |
| 17 | KN. Kota Madiun | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 6 | 6 | 100,00 |
| 18 | KN. Kab Madiun | 2 | 2 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 |
| 19 | KN. Ngawi | 4 | 4 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 |
| 20 | KN. Magetan | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | - |
| 21 | KN. Ponorogo | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 |
| 22 | KN. Pacitan | 6 | 6 | 100,00 | 5 | 5 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 |
| 23 | KN. Kota Kediri | 6 | 6 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 5 | 5 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 5 | 5 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 |
| 24 | KN. Kab Kediri | 8 | 8 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 6 | 6 | 100,00 |
| 25 | KN. Blitar | 5 | 5 | 100,00 | 5 | 5 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 |
| 26 | KN. Nganjuk | 8 | 8 | 100,00 | 8 | 8 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 |
| 27 | KN. Tulungagung | 1 | 1 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 |
| 28 | KN. Trenggalek | 4 | 4 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 5 | 5 | 100,00 |
| 29 | KN. Jember | 6 | 6 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 5 | 5 | 100,00 | 7 | 7 | 100,00 | 6 | 6 | 100,00 |
| 30 | KN. Bondowoso | 34 | 34 | 100,00 | 34 | 34 | 100,00 | 6 | 6 | 100,00 | 6 | 6 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 31 | KN. Situbondo | 11 | 11 | 100,00 | 12 | 12 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 11 | 11 | 100,00 |
| 32 | KN. Banyuwangi | 7 | 7 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100,00 |
| 33 | KN. Bojonegoro | 7 | 7 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 |
| 34 | KN. Tuban | 6 | 6 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 |
| 35 | KN. Lamongan | 18 | 18 | 100,00 | 6 | 6 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 9 | 9 | 100,00 | 5 | 5 | 100,00 |
| 36 | KN. Pamekasan | 21 | 21 | 100,00 | 6 | 6 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 |
| 37 | KN. Sumenep | 6 | 6 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 6 | 6 | 100,00 | 6 | 6 | 100,00 | 7 | 7 | 100,00 | 10 | 10 | 100,00 |
| 38 | KN. Bangkalan | 2 | 2 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 5 | 5 | 100,00 | 4 | 4 | 100,00 | 7 | 7 | 100,00 |
| 39 | KN. Sampang | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0 | - |
| JUMLAH | | 383 | 383 | 100,00 | 212 | 212 | 100,00 | 158 | 158 | 100,00 | 147 | 147 | 100,00 | 127 | 127 | 100,00 | 169 | 169 | 100,00 |

Tabel 29
Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Kepabean, Cukai, Pajak, TPPU
Di tahap Pra Penuntutan, Penuntutan, Eksekusi
Tahun 2023

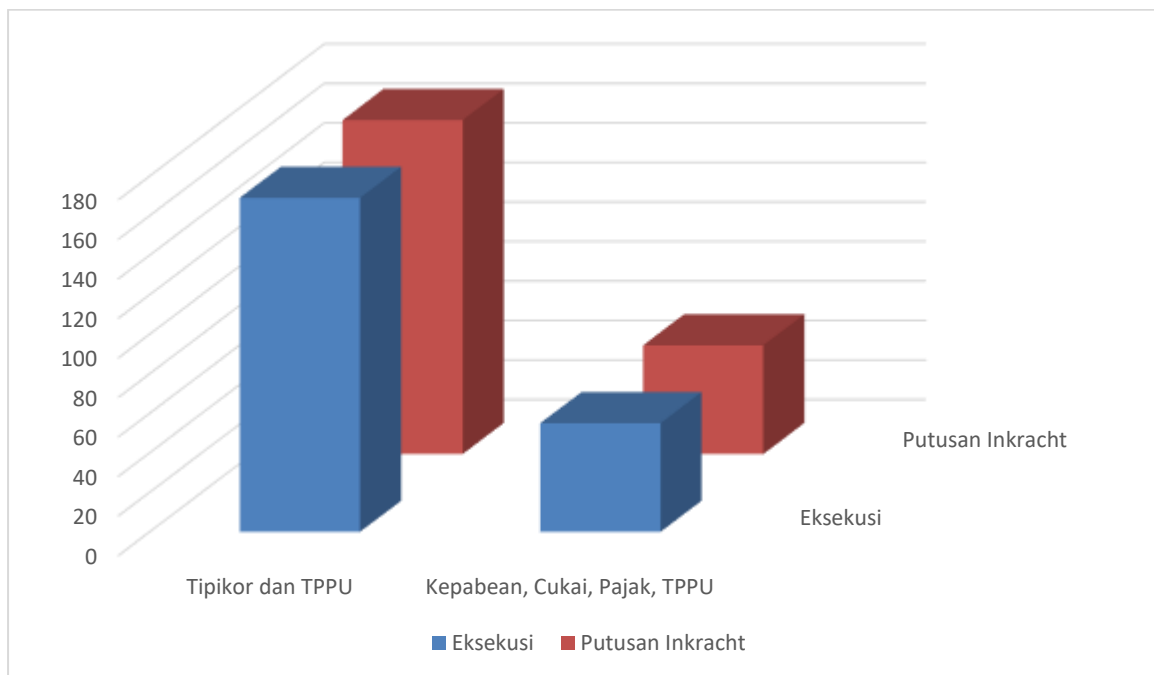
| No | Satuan Kerja Wilayah | Pra Penuntutan | | | | | Penuntutan | | | | | Eksekusi Badan (orang) | | |
|----|----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-----|------------|----------------|--------------|----------------|-----|------------------------|--------------|-----|
| | | Ditangani | | Diselesaikan | | % | Ditangani | | Diselesaikan | | % | Ditangani | Diselesaikan | % |
| | | Pajak | Kepabean Cukai | Pajak | Kepabean Cukai | | Pajak | Kepabean Cukai | Pajak | Kepabean Cukai | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 1 | KT. Jawa Timur | 8 | 2 | 8 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | KN. Surabaya | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | 4 | 1 | 4 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 |
| 3 | KN. Sidoarjo | 2 | - | 2 | - | 100 | 3 | - | 3 | - | 100 | 4 | 4 | 100 |
| 4 | KN. Tanjung Perak | 1 | - | 1 | - | 100 | 4 | - | 4 | - | 100 | 3 | 3 | 100 |
| 5 | KN. Gresik | 2 | - | - | - | 100 | 3 | - | 3 | - | 100 | 3 | 3 | 100 |
| 6 | KN. Kota Mojokerto | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| 7 | KN. Kab.Mojokerto | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 8 | KN. Jombang | 2 | - | 2 | - | 100 | 2 | - | 2 | - | 100 | 3 | 3 | 100 |
| 9 | KN. Kota Malang | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 10 | KN. Kab Malang | 2 | - | 2 | - | 100 | 4 | - | 4 | - | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 11 | KN. Batu | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| 12 | KN. Kota Pasuruan | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| 13 | KN. Kab Pasuruan | 5 | - | 5 | - | 100 | 5 | - | 5 | - | 100 | 5 | 5 | 100 |
| 14 | KN. Kota Probolinggo | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| 15 | KN. Kab Probolinggo | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| 16 | KN. Lumajang | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| 17 | KN. Kota Madiun | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| 18 | KN. Kab Madiun | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| 19 | KN. Ngawi | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| 20 | KN. Magetan | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| 21 | KN. Ponorogo | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 22 | KN. Pacitan | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| 23 | KN. Kota Kediri | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| 24 | KN. Kab Kediri | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| 25 | KN. Blitar | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - | 100 | 0 | 0 | - |
| 26 | KN. Nganjuk | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - | 100 | 2 | 2 | 100 |
| 27 | KN. Tulungagung | 1 | - | 1 | - | 100 | 1 | - | 1 | - | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 28 | KN. Trenggalek | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 29 | KN. Jember | 7 | - | 7 | - | 100 | 7 | - | 7 | - | 100 | 6 | 6 | 100 |
| 30 | KN. Bondowoso | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 1 | 100 |
| 31 | KN. Situbondo | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| 32 | KN. Banyuwangi | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 1 | 100 |
| 33 | KN. Bojonegoro | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 34 | KN. Tuban | 2 | - | 2 | - | 100 | 2 | - | 2 | - | 100 | 2 | 2 | 100 |
| 35 | KN. Lamongan | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - | 100 | 0 | 0 | - |
| 36 | KN. Pamekasan | 2 | - | 2 | - | 100 | 2 | - | 2 | - | 100 | 5 | 5 | 100 |
| 37 | KN. Sumenep | 0 | - | 0 | - | - | 2 | - | 2 | - | 100 | 2 | 2 | 100 |
| 38 | KN. Bangkalan | 5 | - | 5 | - | 100 | 4 | - | 4 | - | 100 | 7 | 7 | 100 |
| 39 | KN. Sampang | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| Jumlah | | 41 | 3 | 41 | 3 | 100 | 49 | 1 | 49 | 1 | 100 | 55 | 55 | 100 |

Berdasarkan tabel di atas sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 dapat diketahui jumlah Putusan Perkara Tipikor dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejumlah **169 (serratus enam puluh sembilan) perkara** dan yang telah dieksekusi sejumlah **169 (serratus enam puluh sembilan) perkara** dan Perkara Kepabean, Cukai, Pajak, TPPU yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejumlah **55 (lima puluh lima) perkara** selanjutnya yang telah Putusan yang telah dieksekusi adalah sejumlah **55 (lima puluh lima) perkara**, selanjutnya dapat kita jumlahkan masing-masing total Putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan total Putusan yang telah dieksekusi adalah **224 (dua ratus dua puluh empat) Putusan Inkracht** dan **224 (dua ratus dua puluh empat) Putusan** yang telah dieksekusi.

Diagram 8

Perbandingan Perkara Tipikor dan TPPU dengan Perkara Kepabean, Cukai, Pajak, TPPU yang telah Inkracht dan dieksekusi



Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus Berdasarkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus Berdasarkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.}} \times 100$$

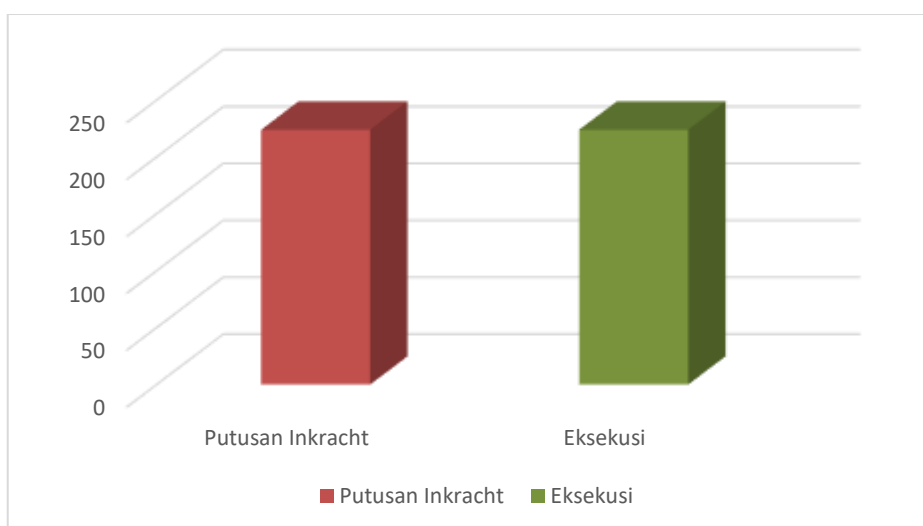
Berdasarkan data tersebut di atas, maka capaian keberhasilan eksekusi putusan tindak pidana khusus tersebut adalah 100 % dari total keseluruhan perkara tindak pidana khusus yang berkekuatan hukum tetap.

$$\frac{224}{224} \times 100 = 100 \%$$

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan persentase perkara tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi telah melebihi target yaitu 85 %. Hal terlaksanakan berkat kecepatan para Jaksa melaksanakan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Diagram 9

Persentase Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkekuatan hukum tetap



Keberhasilan dalam pelaksanaan eksekusi perkara korupsi tidak terlepas dari komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan se Jawa Timur untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi secara tuntas. Namun penanganan perkara tindak pidana korupsi masih terkendala kurangnya anggaran baik di Kejaksaan Tinggi maupun di seluruh Satuan Kerja Kejaksaan Negeri se Jawa Timur.

SASARAN STRATEGIS 5 :

MENINGKATNYA PENGEMBALIAN ASET DAN KERUGIAN NEGARA

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari Indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 30

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis V

| Indikator Kinerja | Target |
|---|--------|
| Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi. | 82 |
| Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi. | 82 |

5.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi merupakan *resultante* dari sejumlah variabel upaya penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam proses penanganan perkara baik pengembalian kerugian negara di tahap penyidikan dan penuntutan, pembayaran uang pengganti dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari barang bukti hasil tindak pidana yang dirampas untuk negara.

Adapun Persentase keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dihitung dari pemenuhan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana dengan formulasi.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
dari penanganan perkara pidana.

----- X 100

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
dari penanganan perkara pidana.

Dari sebanyak 27 pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksanaan RI, terdapat 6 pos PNBP yang realisasinya dikaitkan dengan kerugian keuangan negara, yaitu :

Tabel 31
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Triwulan IV Tahun 2023

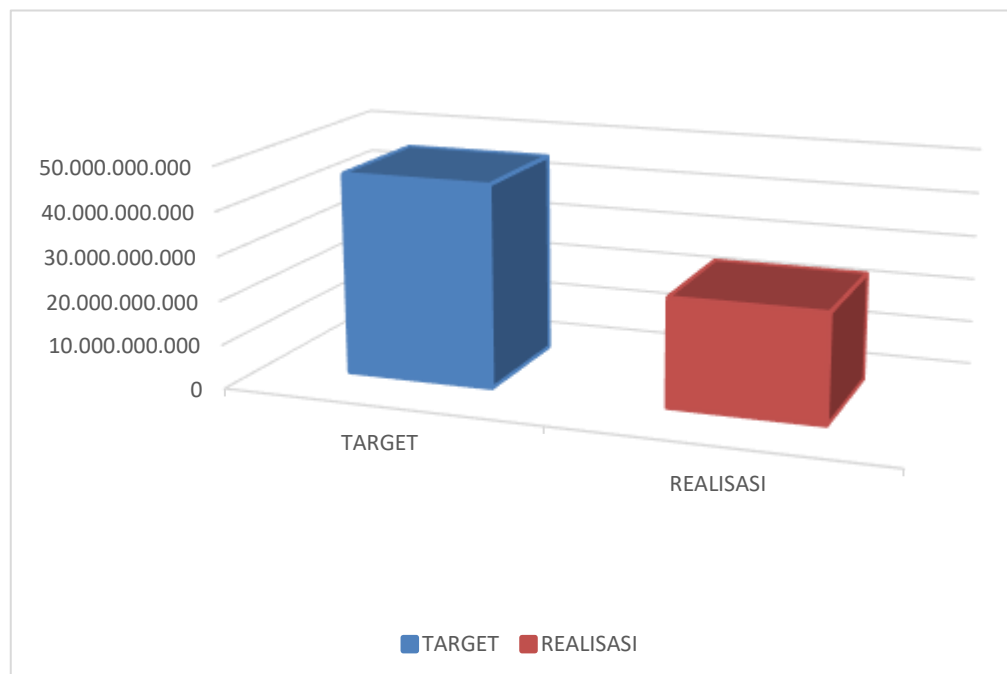
| No. | Jenis PNBP | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Pencapaian (%) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1. | Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan (425236) | 17.875.850.000 | 6.739.507.418 | 37,70 |
| 2. | Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan (425241) | 6.786.750.000 | 2.478.698.500 | 38,21 |
| 3. | Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan (425243) | 11.171.700.000 | 8.945.953.042 | 80,08 |
| 4. | Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi (425246) | 9.011.500.000 | 2.425.735.045 | 26,92 |
| 5. | Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara (425248) | 33.800.000 | 0 | - |
| 6. | Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan (425249) | 929.650.000 | 3.832.621.838 | 412,27 |
| TOTAL | | 45.809.250.000 | 24.422.515.843 | 53,66 |

Capaian keberhasilan pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana pada seluruh satker Kejaksanaan se Jawa Timur sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar 53,66 % dari total target yang ditentukan dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Rp. 24.422.515.843}}{\text{Rp. 45.809.250.000}} \times 100 = 53,66 \%$$

Bahwa dapat disimpulkan bahwa sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 ini realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diseluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu 82 %.

Diagram 10
PNBP Penanganan Perkara Pidana



Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 Jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur berhasil memulihkan kerugian keuangan negara pada tahap eksekusi sebesar **Rp. 24.422.515.843,- (tiga belas milyar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).**

Tabel 32
Rekapitulasi Penyelesaian Barang Rampasan Tindak Pidana Khusus
Sampai dengan Tahun 2023

| No. | Satuan Kerja | No. Register Perkara | Jenis Barang Rampasan | Penyelesaian Barang Rampasan | Ket. |
|-----|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Kejati Jawa Timur | - | - | - | NIHIL |
| 2 | Kejari Surabaya | PDS - 14 /M.5.10 /Ft.1/09/2022 | Uang Tunai Sebesar Rp. 45.000.000,- | Tanggal 10 Oktober 2023 no. NTPN 3BDC755DF0GSV1VN | Dirampas Untuk Negara |
| 3 | Kejari Tanjung Perak | - | - | - | NIHIL |
| 4 | Kejari Gresik | - | - | - | NIHIL |
| 5 | Kejari Sidoarjo | - | - | - | NIHIL |

| | | | | | |
|----|-------------------------|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| 6 | Kejari Kota Mojokerto | - | - | - | NIHIL |
| 7 | Kejari Kab. Mojokerto | - | - | - | NIHIL |
| 8 | Kejari Jombang | - | - | - | NIHIL |
| 9 | Kejari Kota Malang | - | - | - | NIHIL |
| 10 | Kejari Kab. Malang | PDS - 04/ M.5.20 / Ft.1 / 06 / 2021 | Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- | Tanggal 20 Januari 2023 No. NTPN DD54561QUQ8P0JPS | Dirampas Untuk Negara |
| 11 | Kejari Batu | - | - | - | NIHIL |
| 12 | Kejari Kota Pasuruan | - | - | - | NIHIL |
| 13 | Kejari Kab. Pasuruan | - | - | - | NIHIL |
| 14 | Kejari Kota Probolinggo | - | - | - | NIHIL |
| 15 | Kejari Kab. Probolinggo | - | - | - | NIHIL |
| 16 | Kejari Lumajang | - | - | - | NIHIL |
| 17 | Kejari Kota Madiun | - | - | - | NIHIL |
| 18 | Kejari Kab. Madiun | - | - | - | NIHIL |
| 19 | Kejari Ngawi | - | - | - | NIHIL |
| 20 | Kejari Magetan | - | - | - | NIHIL |
| 21 | Kejari Ponorogo | - | - | - | NIHIL |
| 22 | Kejari Pacitan | - | - | - | NIHIL |
| 23 | Kejari Kota Kediri | - | - | - | NIHIL |
| 24 | Kejari Kab. Kediri | - | - | - | NIHIL |
| 25 | Kejari Blitar | - | - | - | NIHIL |
| 26 | Kejari Nganjuk | - | - | - | NIHIL |
| 27 | Kejari Tulungagung | - | - | - | NIHIL |
| 28 | Kejari Trenggalek | - | - | - | NIHIL |
| 29 | Kejari Jember | - | - | - | NIHIL |
| 30 | Kejari Bondowoso | PDS-04/ M.5.17/Ft.1/04/2022 | <ul style="list-style-type: none"> • Brankas tempat penyimpanan pita cukai palsu pada ruang kerja RAHMATULLAH BIN Alm. H. ABDUL HADI • 2 Unit mesin untuk melekatkan pita cukai | tanggal 03 November 2023 nomor NTPN ADBB68N3EAT79O6L | dilelang dan disetor ke kas negara |
| 31 | Kejari Situbondo | - | - | - | NIHIL |
| 32 | Kejari Banyuwangi | - | - | - | NIHIL |
| 33 | Kejari Bojonegoro | - | - | - | NIHIL |
| 34 | Kejari Tuban | - | - | - | NIHIL |
| 35 | Kejari Lamongan | - | - | - | NIHIL |
| 36 | Kejari Pamekasan | - | - | - | NIHIL |
| 37 | Kejari Sumenep | PDS-06/SUMEN/VII/2023 | Uang Tunai sebesar Rp. 201.189.959,00 | Tanggal 28 Desember 2023 Nomor NTPN 9DDAA48VV650U8HS | Dirampas Untuk Negara |
| 38 | Kejari Bangkalan | - | - | - | NIHIL |
| 39 | Kejari Sampang | - | - | - | NIHIL |

Tabel 33
Rekapitulasi Penyelesaian Benda Sitaan Tindak Pidana Khusus
Tahun 2023

| No | Satuan Kerja | No. Register Perkara | Jenis Benda Sitaan | Penyelesaian Benda Sitaan | Ket. |
|----|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 1 | Kejati Jawa Timur | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | Kejari Surabaya | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | Kejari Tanjung Perak | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | Kejari Gresik | PDS-02/Tg.Perak/05/2023 | Uang Tunai Rp.250,000,000,- | 23 October 2023 | Uang tunai Rp.250.000.000,- dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti Cq. PT. Perikanan Indonesia |
| 5 | Kejari Sidoarjo | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | Kejari Kota Mojokerto | PDS-01/KT.MKT/Fd.1/01/2023 | Uang Tunai Rp.253,000,000,- | Nomor NTPN 102093CIFB6CSFBF Tanggal 16 Agustus 2023 | Uang tunai Rp.253.000.000,- disetorkan ke kas Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti |
| 7 | Kejari Kab. Mojokerto | PDS-01/M.5.23/Ft.1/02/2022 | Uang tunai sebesar Rp 261.482.400,- | 14 February 2023 | Dirampas dan disetorkan ke Kas Negara Cq UPK Kecamatan Jatirejo dan diperhitungkan sebagai sebageian uang pengganti kerugian keuangan negara |
| 8 | Kejari Jombang | | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | Kejari Kota Malang | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 10 | Kejari Kab. Malang | PDS - 01/ M.5.20 / Ft.1 / 10 / 2022 | Dokumen dan Stempel | 29 March 2023 | Dikembalikan kepada yang Saksi/Berhak |
| 11 | Kejari Batu | PDS – 03 / M.5.20 / Ft.1 / 11 / 2022 | Dokumen | 23 February 2023 | Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara |
| 12 | Kejari Kota Pasuruan | PDS- 01/BATU/07/2023 | DOKUMEN | - | BARANG BUKTI DOKUMEN TERLAMPIR |
| 13 | Kejari Kab. Pasuruan | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 14 | Kejari Kota Probolinggo | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 15 | Kejari Kab. Probolinggo | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 16 | Kejari Lumajang | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 17 | Kejari Kota Madiun | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 18 | Kejari Kab. Madiun | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 19 | Kejari Ngawi | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 20 | Kejari Magetan | PDS-01/NGW/01/2023 | UANG TUNAI Rp. 167.900.000,- | 19 December 2023 | UANG TUNAI Rp. 167.900.000,- DIRAMPAS DAN DISETORKAN KE KAS NEGARA |
| 21 | Kejari Ponorogo | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 22 | Kejari Pacitan | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 23 | Kejari Kota Kediri | PDS-02/PCTAN/11/2022 | DOKUMEN | 06 December 2023 | BARANG BUKTI DOKUMEN TETAP TERLAMPIR DALAM |

| | | | | | |
|----|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | | | BERKAS PERKARA |
| 24 | Kejari Kab. Kediri | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 25 | Kejari Blitar | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 26 | Kejari Nganjuk | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 27 | Kejari Tulungagung | PDS-08/NGANJ/07/2022 | Uang tunai Rp. 245.000.000,- | NTPN Nomor: 493401JNFLFRN39B Tanggal 21-02-2023 | Disetor ke Kas Negara sebagai pemulihan kerugian Negara |
| 28 | Kejari Trenggalek | PDS-01/TGUNG/02/2022 | DOKUMEN | - | BARANG BUKTI DOKUMEN TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA |
| 29 | Kejari Jember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 30 | Kejari Bondowoso | PDS-03/JMBER/07/2022 | Uang tunai sebesar Rp. 44.558.000,- | 2BEC97QLUFIVOQ4 G tanggal 02 Maret 2023 | Disetor ke Kas Negara |
| 31 | Kejari Situbondo | PDS-04 /BONDO/08/2022 | Uang Tunai sebesar Rp.348.250.000,- | D018C0N9VRFFBBL0 tanggal 28 Agustus 2023 | Disetor ke Kas Negara |
| 32 | Kejari Banyuwangi | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 33 | Kejari Bojonegoro | | | | |
| 34 | Kejari Tuban | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 35 | Kejari Lamongan | PDS-03/LAMON/03/2022 | DOKUMEN | - | BARANG BUKTI DOKUMEN TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA |
| | | | UANG TUNAI Rp 182.145.000,- | 09 January 2023 | UANG TUNAI Rp 182.145.000,- DIRAMPAS DAN DISETORKAN KE KAS NEGARA CQ. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN UNTUK DIPERHITUNGAN SEBAGAI UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (NTPN: 35B562C4VFUTRB04) |
| | | PDS-03/LAMON/02/2023 | UANG TUNAI Rp. 496.000.000,- | 02 October 2023 | DISETORKAN KE KAS NEGARA CQ. KAS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR (STS : No.41 KAJARI LMG/DAVID) |
| | | PDS-05/LAMON/02/2023 | UANG TUNAI Rp 158.000.000,- | 02 October 2023 | DISETORKAN KE KAS NEGARA CQ. KAS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR (STS : No.41 KAJARI LMG/FITRI YADI) |
| | | | DOKUMEN | 02 October 2023 | BARANG BUKTI DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI/YANG BERHAK |
| 36 | Kejari Pamekasan | - | - | - | NIHIL |
| 37 | Kejari Sumenep | - | - | - | NIHIL |
| 38 | Kejari Bangkalan | - | - | - | NIHIL |
| 39 | Kejari Sampang | - | - | - | NIHIL |

Tabel 34
Rekapitulasi Pengembalian Kerugian Negara
Melalui Tindak Pidana Khusus
Triwulan IV Tahun 2023

| No. | Satuan Kerja | Barang Rampasan (Rp) | Uang Sitaan (Rp) | Denda (Rp) | Uang Pengganti (Rp) |
|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | Kejati Jawa Timur | - | - | - | - |
| 2 | Kejari Surabaya | 45.000.000 | - | 12.573.045 | 78.000.000 |
| 3 | Kejari Tanjung Perak | - | - | - | - |
| 4 | Kejari Gresik | - | 250.000.000 | - | 250.000.000 |
| 5 | Kejari Sidoarjo | - | - | 50.000.000 | 270.411.000 |
| 6 | Kejari Kota Mojokerto | - | 253.000.000 | 50.000.000 | 253.000.000 |
| 7 | Kejari Kab. Mojokerto | - | - | 50.000.000 | 261.482.400 |
| 8 | Kejari Jombang | - | - | - | 2.903.548.572 |
| 9 | Kejari Kota Malang | - | - | 50.000.000 | - |
| 10 | Kejari Kab. Malang | 15.000.000 | - | - | 25.000.000 |
| 11 | Kejari Batu | - | - | - | 1.992.053.900 |
| 12 | Kejari Kota Pasuruan | - | - | - | 92.006.363 |
| 13 | Kejari Kab. Pasuruan | - | - | 500.000.000 | 821.870.500 |
| 14 | Kejari Kota Probolinggo | - | - | - | - |
| 15 | Kejari Kab. Probolinggo | - | - | - | - |
| 16 | Kejari Lumajang | - | - | - | - |
| 17 | Kejari Kota Madiun | - | 28.665.000 | - | 258.809.037 |
| 18 | Kejari Kab. Madiun | 515.890.000 | 497.760.000 | - | - |
| 19 | Kejari Ngawi | - | 167.900.000 | 150.000.000 | 981.315.000 |
| 20 | Kejari Magetan | - | - | - | - |
| 21 | Kejari Ponorogo | - | - | 200.000.000 | - |
| 22 | Kejari Pacitan | - | - | 50.000.000 | 827.795.234 |
| 23 | Kejari Kota Kediri | - | - | - | 448.072.874 |
| 24 | Kejari Kab. Kediri | - | - | 250.000.000 | - |
| 25 | Kejari Blitar | - | - | - | 20.000.000.000 |
| 26 | Kejari Nganjuk | - | 245.000.000 | 200.000.000 | - |
| 27 | Kejari Tulungagung | - | - | - | 1.695.234.203 |
| 28 | Kejari Trenggalek | - | - | - | 91.000.000 |
| 29 | Kejari Jember | 44.558.000 | - | 100.000.000 | 186.705.000 |
| 30 | Kejari Bondowoso | 1.300.000 | 348.250.000.000 | - | - |
| 31 | Kejari Situbondo | 4.720.000 | - | 400.000.000 | 450.376.900 |
| 32 | Kejari Banyuwangi | - | - | - | - |
| 33 | Kejari Bojonegoro | - | 798.887.500 | - | 33.300.000 |
| 34 | Kejari Tuban | - | - | 3.250.000.000 | 250.464.858 |
| 35 | Kejari Lamongan | - | - | - | 836.145.000 |
| 36 | Kejari Pamekasan | - | - | 50.000.000 | 135.138.800 |
| 37 | Kejari Sumenep | 201.189.959 | - | - | 201.189.959 |
| 38 | Kejari Bangkalan | - | - | 100.000.000 | 237.939.400 |
| 39 | Kejari Sampang | - | - | - | - |
| JUMLAH | | 827.657.959 | 350.491.212.500 | 5.462.573.045 | 33.580.859.000 |

5.2. Persentase Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk 5 (lima) fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Indonesia nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia PER 006/A/JA/03/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu : 1) Bantuan

Hukum; 2) Pertimbangan Hukum; 3) Penegakan Hukum; 4) Tindak Hukum Lainnya; 5) Pelayanan Hukum.

Persentase penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan melalui jalur perdata dihitung berdasarkan kinerja penanganan perkara Perdata dan TUN yang berhasil diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan RI. sebagai berikut :

$$\frac{\text{Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan TUN}}{\text{Jumlah Penanganan Perkara Perdata dan TUN}} \times 100$$

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menangani sebanyak 3.372 Perkara Perdata, TUN dan Non Litigasi berdasarkan surat kuasa Khusus dan / atau permohonan dari Kementerian/Lembaga/ Kota dan jajaran BUMN / BUMD. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.556 perkara telah berhasil diselesaikan atau mencapai 46,14%

$$\frac{1.556}{3.372} \times 100 = 46,14 \%$$

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sampai Triwulan IV Tahun 2023 yaitu sebesar 46,14 % masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 82 %.

Tabel 35
Rekapitulasi Perkara Perdata (Litigasi)
Tahun 2023

| NO. | SATKER | JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI | JUMLAH PERKARA DISELESAIKAN | % |
|-----|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|
| 1 | Kejaksaan Tinggi Jawa Timur | 16 | 15 | 93,75 |
| 2 | Kejaksaan Negeri Surabaya | 17 | 12 | 70,59 |
| 3 | Kejaksaan Negeri Tanjung Perak | 5 | 5 | 100,00 |
| 4 | Kejaksaan Negeri Gresik | 1 | 1 | 100,00 |
| 5 | Kejaksaan Negeri Sidoarjo | 6 | 3 | 50,00 |
| 6 | Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto | 2 | 1 | 50,00 |
| 8 | Kejaksaan Negeri Kota Malang | 3 | 3 | 100,00 |
| 9 | Kejaksaan Negeri Kab. Malang | 3 | 3 | 100,00 |
| 10 | Kejaksaan Negeri Lumajang | 3 | 1 | 33,33 |
| 11 | Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan | 5 | 2 | 40,00 |
| 12 | Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan | 2 | 2 | 100,00 |

| | | | | |
|---------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
| 13 | Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo | 2 | 2 | 100,00 |
| 14 | Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo | 26 | 9 | 34,62 |
| 15 | Kejaksaan Negeri Batu | 1 | 1 | 100,00 |
| 16 | Kejaksaan Negeri Kota Madiun | 0 | 0 | - |
| 17 | Kejaksaan Negeri Kab. Madiun | 4 | 4 | 100,00 |
| 18 | Kejaksaan Negeri Ngawi | 0 | 0 | - |
| 19 | Kejaksaan Negeri Magetan | 0 | 0 | - |
| 20 | Kejaksaan Negeri Ponorogo | 0 | 0 | - |
| 21 | Kejaksaan Negeri Pacitan | 0 | 0 | - |
| 22 | Kejaksaan Negeri Kota Kediri | 1 | 0 | - |
| 23 | Kejaksaan Negeri Kab. Kediri | 6 | 5 | 83,33 |
| 24 | Kejaksaan Negeri Nganjuk | 1 | 1 | 100,00 |
| 25 | Kejaksaan Negeri Blitar | 1 | 1 | 100,00 |
| 26 | Kejaksaan Negeri Tulung Agung | 1 | 1 | 100,00 |
| 27 | Kejaksaan Negeri Trenggalek | 0 | 0 | - |
| 28 | Kejaksaan Negeri Bojonegoro | 0 | 0 | - |
| 29 | Kejaksaan Negeri Tuban | 3 | 1 | 33,33 |
| 30 | Kejaksaan Negeri Lamongan | 0 | 0 | - |
| 31 | Kejaksaan Negeri Jombang | 1 | 0 | - |
| 32 | Kejaksaan Negeri Jember | 79 | 70 | 88,61 |
| 33 | Kejaksaan Negeri Banyuwangi | 1 | 0 | - |
| 34 | Kejaksaan Negeri Situbondo | 2 | 2 | 100,00 |
| 35 | Kejaksaan Negeri Bondowoso | 0 | 0 | - |
| 36 | Kejaksaan Negeri Pamekasan | 1 | 1 | 100,00 |
| 37 | Kejaksaan Negeri Sumenep | 0 | 0 | - |
| 38 | Kejaksaan Negeri Sampang | 0 | 0 | - |
| 39 | Kejaksaan Negeri Bangkalan | 1 | 1 | 100,00 |
| JUMLAH | | 195 | 147 | 75,38 |

Tabel 36
Rekapitulasi Perkara TUN (Litigasi)
Triwulan IV Tahun 2023

| NO. | SATKER | JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI | JUMLAH PERKARA DISELESAIKAN | % |
|-----|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|
| 1 | Kejaksaan Tinggi Jawa Timur | 2 | 2 | 100,00 |
| 2 | Kejaksaan Negeri Surabaya | 6 | 2 | 33,33 |
| 3 | Kejaksaan Negeri Tanjung Perak | 1 | 1 | 100,00 |
| 4 | Kejaksaan Negeri Gresik | 0 | 0 | - |
| 5 | Kejaksaan Negeri Sidoarjo | 1 | 1 | 100,00 |
| 6 | Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto | 0 | 0 | - |
| 7 | Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto | 0 | 0 | - |
| 8 | Kejaksaan Negeri Kota Malang | 0 | 0 | - |
| 9 | Kejaksaan Negeri Kab. Malang | 0 | 0 | - |
| 10 | Kejaksaan Negeri Lumajang | 0 | 0 | - |
| 11 | Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan | 2 | 2 | 100,00 |

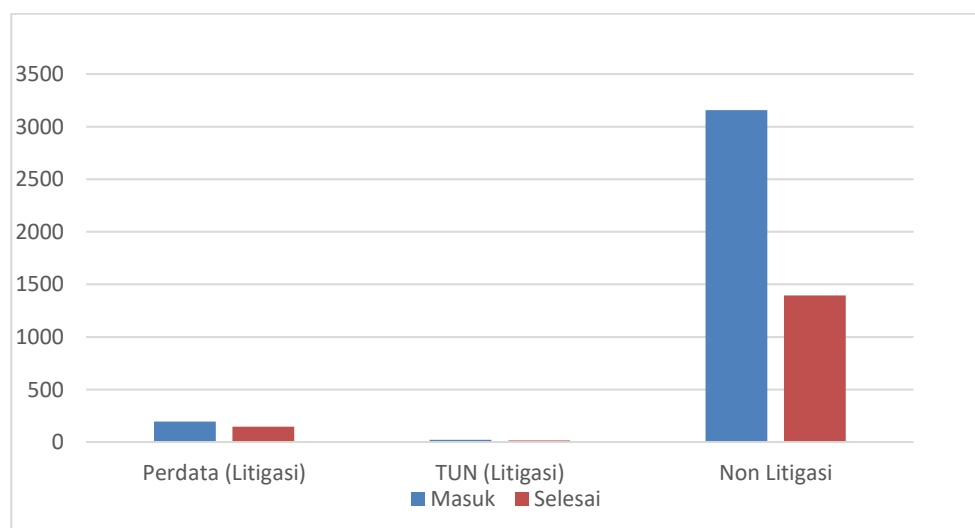
| | | | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 12 | Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan | 0 | 0 | - |
| 13 | Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo | 0 | 0 | - |
| 14 | Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo | 0 | 0 | - |
| 15 | Kejaksaan Negeri Batu | 0 | 0 | - |
| 16 | Kejaksaan Negeri Kota Madiun | 0 | 0 | - |
| 17 | Kejaksaan Negeri Kab. Madiun | 0 | 0 | - |
| 18 | Kejaksaan Negeri Ngawi | 0 | 0 | - |
| 19 | Kejaksaan Negeri Magetan | 0 | 0 | - |
| 20 | Kejaksaan Negeri Ponorogo | 0 | 0 | - |
| 21 | Kejaksaan Negeri Pacitan | 0 | 0 | - |
| 22 | Kejaksaan Negeri Kota Kediri | 0 | 0 | - |
| 23 | Kejaksaan Negeri Kab. Kediri | 7 | 7 | 100,00 |
| 24 | Kejaksaan Negeri Nganjuk | 0 | 0 | - |
| 25 | Kejaksaan Negeri Blitar | 0 | 0 | - |
| 26 | Kejaksaan Negeri Tulungagung | 0 | 0 | - |
| 27 | Kejaksaan Negeri Trenggalek | 0 | 0 | - |
| 28 | Kejaksaan Negeri Bojonegoro | 0 | 0 | - |
| 29 | Kejaksaan Negeri Tuban | 0 | 0 | - |
| 30 | Kejaksaan Negeri Lamongan | 0 | 0 | - |
| 31 | Kejaksaan Negeri Jombang | 0 | 0 | - |
| 32 | Kejaksaan Negeri Jember | 1 | 0 | - |
| 33 | Kejaksaan Negeri Banyuwangi | 0 | 0 | - |
| 34 | Kejaksaan Negeri Situbondo | 0 | 0 | - |
| 35 | Kejaksaan Negeri Bondowoso | 0 | 0 | - |
| 36 | Kejaksaan Negeri Pamekasan | 0 | 0 | - |
| 37 | Kejaksaan Negeri Sumenep | 0 | 0 | - |
| 38 | Kejaksaan Negeri Sampang | 0 | 0 | - |
| 39 | Kejaksaan Negeri Bangkalan | 0 | 0 | - |
| JUMLAH | | 20 | 15 | 75,00 |

Tabel 37
Rekapitulasi Perkara Non Litigasi
Triwulan IV Tahun 2023

| NO. | SATKER | JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI | JUMLAH PERKARA DISELESAIKAN | % |
|-----|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|
| 1 | Kejaksaan Tinggi Jawa Timur | 13 | 8 | 61,54 |
| 2 | Kejaksaan Negeri Surabaya | 285 | 13 | 4,56 |
| 3 | Kejaksaan Negeri Tanjung Perak | 49 | 3 | 6,12 |
| 4 | Kejaksaan Negeri Gresik | 32 | 32 | 100,00 |
| 5 | Kejaksaan Negeri Sidoarjo | 776 | 440 | 56,70 |
| 6 | Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto | 116 | 34 | 29,31 |
| 7 | Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto | 158 | 17 | 10,76 |
| 8 | Kejaksaan Negeri Kota Malang | 123 | 123 | 100,00 |
| 9 | Kejaksaan Negeri Kab. Malang | 10 | 7 | 70,00 |
| 10 | Kejaksaan Negeri Lumajang | 3 | 2 | 66,67 |

| | | | | |
|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 | Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan | 0 | 0 | - |
| 12 | Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan | 60 | 15 | 25,00 |
| 13 | Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo | 7 | 0 | - |
| 14 | Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo | 5 | 5 | 100,00 |
| 15 | Kejaksaan Negeri Batu | 13 | 13 | 100,00 |
| 16 | Kejaksaan Negeri Kota Madiun | 32 | 16 | 50,00 |
| 17 | Kejaksaan Negeri Kab. Madiun | 37 | 31 | 83,78 |
| 18 | Kejaksaan Negeri Ngawi | 89 | 0 | - |
| 19 | Kejaksaan Negeri Magetan | 99 | 75 | 75,76 |
| 20 | Kejaksaan Negeri Ponorogo | 68 | 68 | 100,00 |
| 21 | Kejaksaan Negeri Pacitan | 57 | 19 | 33,33 |
| 22 | Kejaksaan Negeri Kota Kediri | 53 | 4 | 7,55 |
| 23 | Kejaksaan Negeri Kab. Kediri | 21 | 0 | - |
| 24 | Kejaksaan Negeri Nganjuk | 0 | 0 | - |
| 25 | Kejaksaan Negeri Blitar | 52 | 51 | 98,08 |
| 26 | Kejaksaan Negeri Tulungagung | 24 | 8 | 33,33 |
| 27 | Kejaksaan Negeri Trenggalek | 6 | 0 | - |
| 28 | Kejaksaan Negeri Bojonegoro | 28 | 28 | 100,00 |
| 29 | Kejaksaan Negeri Tuban | 18 | 3 | 16,67 |
| 30 | Kejaksaan Negeri Lamongan | 3 | 0 | - |
| 31 | Kejaksaan Negeri Jombang | 417 | 74 | 17,75 |
| 32 | Kejaksaan Negeri Jember | 77 | 57 | 74,03 |
| 33 | Kejaksaan Negeri Banyuwangi | 245 | 201 | 82,04 |
| 34 | Kejaksaan Negeri Situbondo | 15 | 0 | - |
| 35 | Kejaksaan Negeri Bondowoso | 28 | 13 | 46,43 |
| 36 | Kejaksaan Negeri Pamekasan | 66 | 0 | - |
| 37 | Kejaksaan Negeri Sumenep | 0 | 0 | - |
| 38 | Kejaksaan Negeri Sampang | 41 | 3 | 7,32 |
| 39 | Kejaksaan Negeri Bangkalan | 31 | 31 | 100,00 |
| JUMLAH | | 3.157 | 1.394 | 44,16 |

Diagram 11
Penyelesaian Perkara Perdata, TUN, Non Litigasi
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023



Tabel 38
Rekapitulasi Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata dan TUN
Triwulan IV Tahun 2023

| | Satuan Kerja | Penyelamatan Keuangan Negara | | Pemulihan Keuangan Negara | |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | Rupiah | Mata Uang Asing | Rupiah | Mata Uang Asing |
| 1 | Kejaksaan Tinggi Jawa Timur | 1.163.900.312.000 | - | 29.448.745.672 | - |
| 2 | Kejaksaan Negeri Surabaya | 3.128.524.144.353 | - | 5.580.333.414 | - |
| 3 | Kejaksaan Negeri Tanjung Perak | 1.796.550.000 | - | 36.604.533.950 | - |
| 4 | Kejaksaan Negeri Gresik | - | - | 1.025.208.071 | - |
| 5 | Kejaksaan Negeri Sidoarjo | - | - | 7.185.419.227 | - |
| 6 | Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto | - | - | 218.282.062 | - |
| 7 | Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto | - | - | 691.198.125 | - |
| 8 | Kejaksaan Negeri Kota Malang | 245.601.800.000 | - | 2.331.341.007 | - |
| 9 | Kejaksaan Negeri Kab. Malang | - | - | 226.243.638 | - |
| 10 | Kejaksaan Negeri Lumajang | 1.951.000.000 | - | 253.686.013 | - |
| 11 | Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan | 1.276.152.565.000 | - | - | - |
| 12 | Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan | 10.318.000.000 | - | 566.267.170 | - |
| 13 | Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo | 44.015.203.751 | - | - | - |
| 14 | Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo | 6.306.382.600 | - | 51.428.319 | - |
| 15 | Kejaksaan Negeri Batu | - | - | 49.876.358.039 | - |
| 16 | Kejaksaan Negeri Kota Madiun | 7.002.900.000 | - | 2.939.510 | - |
| 17 | Kejaksaan Negeri Kab. Madiun | - | - | 251.014.943 | - |
| 18 | Kejaksaan Negeri Ngawi | - | - | - | - |
| 19 | Kejaksaan Negeri Magetan | - | - | 9.287.702.536 | - |
| 20 | Kejaksaan Negeri Ponorogo | - | - | 100.060.655 | - |
| 21 | Kejaksaan Negeri Pacitan | - | - | 204.683.952 | - |
| 22 | Kejaksaan Negeri Kota Kediri | 1.521.764.557.023 | - | 1.200.894.056 | - |
| 23 | Kejaksaan Negeri Kab. Kediri | 5.000.000.000 | - | 315.073.420 | - |
| 24 | Kejaksaan Negeri Nganjuk | - | - | 55.571.712 | - |
| 25 | Kejaksaan Negeri Blitar | 4.145.100.000 | - | 1.706.828.400 | - |
| 26 | Kejaksaan Negeri Tulungagung | - | - | 24.940.568 | - |
| 27 | Kejaksaan Negeri Trenggalek | - | - | 446.060.765 | - |
| 28 | Kejaksaan Negeri Bojonegoro | 1.407.630.000 | - | 261.253.932 | - |
| 29 | Kejaksaan Negeri Tuban | - | - | 817.562.639 | - |
| 30 | Kejaksaan Negeri Lamongan | - | - | 200.000.000 | - |
| 31 | Kejaksaan Negeri Jombang | 2.717.998.806 | - | 9.497.971.000 | - |
| 32 | Kejaksaan Negeri Jember | 14.123.270.000 | - | 1.299.039.398 | - |
| 33 | Kejaksaan Negeri Banyuwangi | - | - | - | - |
| 34 | Kejaksaan Negeri Situbondo | 576.158.765 | - | - | - |
| 35 | Kejaksaan Negeri Bondowoso | 6.138.000.000 | - | 25.743.139 | - |
| 36 | Kejaksaan Negeri Pamekasan | 83.422.330 | - | 596.995.458 | - |
| 37 | Kejaksaan Negeri Sumenep | - | - | - | - |
| 38 | Kejaksaan Negeri Sampang | - | - | 851.072.935 | - |
| 39 | Kejaksaan Negeri Bangkalan | - | - | 5.500.000 | - |
| TOTAL | | 7.441.524.994.628 | - | 161.209.953.725 | - |

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mencapai target Sasaran Strategis pada wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023 di dukung oleh anggaran per program/kegiatan, berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yaitu sebesar **512.156.042.000,- (lima ratus dua belas milyar seratus lima puluh enam juta empat puluh dua ribu rupiah)** dengan alokasi anggaran per kegiatan sebagai berikut :

Tabel 39

Dukungan Anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023

| NO | KODE PROGRAM/KEGIATAN | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 1. | 00601BF | Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum | 48.179.734.000,- |
| | 1102 | Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari, dan Cabjari | 1.206.076.000,- |
| | 1103 | Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah | 1.709.060.000,- |
| | 6582 | Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri | 45.264.598.000,- |
| 2. | 00601WA | Program Dukungan Manajemen | 463.976.308.000,- |
| | 1090 | Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejati, Kejari, Cabjari | 458.496.508.000,- |
| | 1091 | Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI | 5.008.800.000,- |
| | 1097 | Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan Kejari yang terdapat Cabjari | 471.000.000,- |
| PAGU KESELURUHAN | | | 512.156.042.000,- |

Adapun realisasi anggaran dari Januari s.d Desember (Triwulan IV) Tahun 2023 pada seluruh Satuan Kerja Kejaksaan pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 40

Realisasi Anggaran per Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Triwulan IV Tahun 2023 dan Triwulan III Tahun 2023

| No. | Satuan Kerja | Triwulan IV Tahun 2023 | | | | Triwulan III Tahun 2023 | | |
|-----|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | Anggaran Semula (Rp) | Anggaran Setelah Revisi (Rp) | Realisasi Belanja (Rp) | Persentase Realisasi Belanja (%) | Anggaran Setelah Revisi (Rp) | Realisasi Belanja (Rp) | Persentase Realisasi Belanja (%) |
| 1 | Kejati Jawa Timur | 114.691.253.000 | 113.155.373.000 | 112.510.820.481 | 99,43 | 106.535.962.000 | 83.397.453.807 | 78,28 |
| 2 | Kejari Surabaya | 20.660.976.000 | 21.362.166.000 | 21.326.241.996 | 99,83 | 19.403.351.000 | 15.319.284.562 | 78,95 |
| 3 | Kejari Bojonegoro | 12.651.337.000 | 12.954.124.000 | 12.755.758.364 | 98,47 | 11.763.511.000 | 9.195.274.336 | 78,17 |
| 4 | Kejari Gresik | 11.725.045.000 | 10.111.445.000 | 10.100.935.762 | 99,90 | 11.176.045.000 | 7.270.920.373 | 65,06 |
| 5 | Kejari Kab. Mojokerto | 9.667.112.000 | 8.902.121.000 | 8.865.914.653 | 99,59 | 9.812.856.000 | 6.103.655.466 | 62,20 |
| 6 | Kejari Lamongan | 9.786.056.000 | 8.623.759.000 | 8.557.388.149 | 99,23 | 9.264.728.000 | 6.065.529.594 | 65,47 |
| 7 | Kejari Tuban | 8.948.689.000 | 7.626.482.000 | 7.483.838.062 | 98,13 | 8.509.543.000 | 5.268.892.948 | 61,92 |
| 8 | Kejari Jombang | 9.947.934.000 | 8.212.585.000 | 8.189.123.929 | 99,71 | 9.486.947.000 | 5.716.623.843 | 60,26 |
| 9 | Kejari Sidoarjo | 17.350.849.000 | 18.330.675.000 | 18.258.634.746 | 99,61 | 16.358.215.000 | 13.362.230.994 | 81,69 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 10 | Kejari Tanjung Perak | 13.113.408.000 | 12.475.771.000 | 12.472.576.726 | 99,97 | 12.466.826.000 | 8.970.721.278 | 71,96 |
| 11 | Kejari Jember | 14.305.758.000 | 12.992.267.000 | 12.983.268.140 | 99,93 | 13.287.934.000 | 9.887.964.240 | 74,41 |
| 12 | Kejari Bondowoso | 8.973.169.000 | 8.651.644.000 | 8.581.037.646 | 99,18 | 8.504.212.000 | 6.243.303.812 | 73,41 |
| 13 | Kejari Situbondo | 8.288.572.000 | 7.281.978.000 | 7.231.058.327 | 99,30 | 7.848.724.000 | 5.122.719.448 | 65,27 |
| 14 | Kejari Banyuwangi | 11.830.316.000 | 11.421.662.000 | 11.320.643.554 | 99,12 | 11.095.752.000 | 8.363.584.124 | 75,38 |
| 15 | Kejari Kota Kediri | 13.214.867.000 | 14.097.213.000 | 13.855.440.039 | 98,28 | 12.276.021.000 | 10.381.406.607 | 84,57 |
| 16 | Kejari Nganjuk | 7.412.564.000 | 6.347.996.000 | 6.304.716.380 | 99,32 | 7.075.077.000 | 4.311.157.337 | 60,93 |
| 17 | Kejari Blitar | 10.685.046.000 | 9.730.427.000 | 9.616.986.273 | 98,83 | 10.001.427.000 | 7.238.498.838 | 72,37 |
| 18 | Kejari Tulungagung | 8.508.375.000 | 8.075.385.000 | 7.729.965.564 | 95,72 | 8.125.262.000 | 5.406.807.160 | 66,54 |
| 19 | Kejari Trenggalek | 7.183.694.000 | 7.235.041.000 | 7.064.604.518 | 97,64 | 6.880.621.000 | 4.959.703.944 | 72,08 |
| 20 | Kejari Pamekasan | 10.635.268.000 | 10.748.719.000 | 10.688.239.360 | 99,44 | 10.025.971.000 | 7.746.988.217 | 77,27 |
| 21 | Kejari Bangkalan | 9.171.377.000 | 8.620.158.000 | 8.536.446.251 | 99,03 | 8.762.827.000 | 6.336.748.298 | 72,31 |
| 22 | Kejari Sumenep | 9.070.962.000 | 8.007.150.000 | 7.722.017.535 | 96,44 | 8.649.051.000 | 5.666.705.251 | 65,52 |
| 23 | Kejari Sampang | 7.740.978.000 | 7.182.181.000 | 7.141.072.151 | 99,43 | 7.409.429.000 | 5.014.934.474 | 67,68 |
| 24 | Kejari Kota Madiun | 12.502.283.000 | 12.955.959.000 | 12.930.352.259 | 99,80 | 11.733.067.000 | 9.372.028.845 | 79,88 |
| 25 | Kejari Ponorogo | 8.695.303.000 | 7.724.359.000 | 7.581.630.872 | 98,15 | 8.855.050.000 | 5.136.470.147 | 58,01 |
| 26 | Kejari Ngawi | 9.160.526.000 | 7.966.594.000 | 7.756.168.652 | 97,36 | 8.655.509.000 | 5.681.379.178 | 65,64 |
| 27 | Kejari Magetan | 8.145.455.000 | 7.489.043.000 | 7.429.500.100 | 99,20 | 7.763.229.000 | 5.243.159.842 | 67,54 |
| 28 | Kejari Pacitan | 6.936.214.000 | 7.244.855.000 | 7.168.025.440 | 98,94 | 7.133.430.000 | 4.957.523.509 | 69,50 |
| 29 | Kejari Kota Malang | 16.618.249.000 | 18.231.764.000 | 18.158.821.240 | 99,60 | 15.653.775.000 | 13.593.380.751 | 86,84 |
| 30 | Kejari Kota Pasuruan | 9.994.657.000 | 9.056.898.000 | 8.854.609.240 | 97,77 | 9.446.310.000 | 6.561.947.394 | 69,47 |
| 31 | Kejari Lumajang | 7.052.739.000 | 7.360.017.000 | 7.323.798.682 | 99,51 | 6.703.049.000 | 5.478.529.735 | 81,73 |
| 32 | Kejari Kota Probolinggo | 6.962.891.000 | 6.854.914.000 | 6.613.841.590 | 96,48 | 6.625.289.000 | 4.540.339.211 | 68,53 |
| 33 | Kejari Kab. Pasuruan | 9.327.454.000 | 8.763.946.000 | 8.759.424.180 | 99,95 | 8.991.435.000 | 6.300.152.339 | 70,07 |
| 34 | Kejari Kab. Probolinggo | 7.694.657.000 | 6.913.914.000 | 6.870.734.859 | 99,38 | 7.335.645.000 | 4.995.951.349 | 68,11 |
| 35 | Kejari Kota Mojokerto | 8.853.926.000 | 6.984.587.000 | 6.945.483.085 | 99,44 | 8.463.327.000 | 4.977.381.873 | 58,81 |
| 36 | Kejari Kab. Malang | 14.888.630.000 | 15.746.229.000 | 15.585.830.808 | 98,98 | 13.933.796.000 | 11.783.309.963 | 84,57 |
| 37 | Kejari Batu | 11.099.447.000 | 9.770.873.000 | 9.642.073.762 | 98,68 | 10.576.994.000 | 6.736.545.677 | 63,69 |
| 38 | Kejari Kab. Kediri | 10.254.623.000 | 9.519.069.000 | 9.063.811.654 | 95,22 | 9.719.663.000 | 6.790.354.869 | 69,86 |
| 39 | Kejari Kab. Madiun | 8.405.383.000 | 7.791.877.000 | 7.522.548.895 | 96,54 | 8.027.535.000 | 5.513.010.452 | 68,68 |
| | TOTAL | 512.156.042.000 | 492.521.220.000 | 487.503.383.924 | 98,98 | 484.337.395.000 | 355.012.574.085 | 73,30 |

Berdasarkan tabel diatas bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan seluruh Satuan Kerja Kejari se Jawa Timur memperoleh anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun 2023 yaitu sebesar **Rp.512.156.042.000 (lima ratus dua belas milyar seratus lima puluh enam juta empat puluh dua ribu rupiah)**, namun pada Triwulan IV Tahun 2023 terdapat revisi pagu anggaran sehingga menjadi sebesar **Rp. 492.521.220.000 (empat ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)**. Selanjutnya anggaran yang telah dicairkan/terrealisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar **Rp. 487.503.383.924 (empat ratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah)** atau **98,98 %** realisasi anggaran.

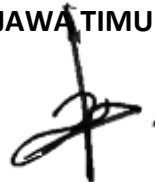
BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunanl Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahunanl Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023 ini disusun dengan memperhatikan Sasaran Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani pada awal tahun anggaran. Dalam penyusunan Laporan Kinerja kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hasil yang terbaik, namun kami menyadari masih banyak kekurangan pada Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu kami mohon saran dan pendapat dari pihak terkait.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023 ini kami sampaikan sebagai laporan.

Surabaya, 3 Januari 2024
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
JAWA TIMUR,



MIA AMIATI

Jaksa Utama Madya NIP. 19650304 198903 2 001



[\(031\) 8291066](tel:(031)8291066)



[@kejatijatim](https://www.instagram.com/kejatijatim)



kejati-jatim.go.id



Jl. Ahmad Yani No.54-56,
Gayungan, Kec. Gayungan,
Surabaya, Jawa Timur 60234

